



**KEPUTUSAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENETAPKAN
KEBIJAKAN MARITIM TAHUN 2011**

***(THE DECISION OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA TO ESTABLISH
MARITIME POLICY IN 2011)***

SKRIPSI

Oleh

Prama Esti Mulyantini

NIM 110910101028

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**KEPUTUSAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENETAPKAN
KEBIJAKAN MARITIM TAHUN 2011**

*(THE DECISION OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA TO ESTABLISH
MARITIME POLICY IN 2011)*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Prama Esti Mulyantini

NIM 110910101028

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini, kupersembahkan kepada:

Allah SWT yang telah memberikan ridho, hidayah dan karunia-Nya

Junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kami

Kedua Orang Tuaku, Bapak Suparmanto dan Ibu Sutini, terimakasih atas kasih sayangnya, atas setiap sujud panjang mendoakanku, atas setiap kesabaran merawat dan membimbingku, atas semua perhatian, nasehat, dan dukungan materil maupun moril yang tiada henti

Saudaraku, Galih Prawiro, Kukuh Teguh dan Titis Sari Putri Rahayu, terimakasih atas dukungan di setiap keputusanku, atas teladan untukku dalam menuntut ilmu, atas kerja keras berjuang demi mendukungku baik materil maupun moril

Keluarga besarku, Kasbun dan Bakri sekeluarga, terima kasih atas kasih sayangnya, atas nasehat dan doa tulus untukku

Sahabatku Ditha, Fitria, Inka, Risa, Diana, Debbi, Dira, teruntuk Amak, terimakasih telah menjadi sahabat yang baik untukku, mendukungku, mendengarkan keluh kesahku ketika segalanya tidak berjalan dengan baik

Guru-guru alumni TK Taman Indria, SDN 1 Kebondalem, SMPN 1 Bangorejo, SMAN 1 Bangorejo dan Dosen-dosenku Universitas Jember, terimakasih telah mengajar dan membimbingku dalam menuntut ilmu

Teman-teman alumni TK Taman Indria angkatan 1997, SDN 1 Kebondalem angkatan 1999, SMPN 1 Bangorejo angkatan 2005, SMAN 1 Bangorejo angkatan 2008, Hubungan Internasional Universitas Jember angkatan 2011 dan UKMF Wisma Gita FISIP Universitas Jember, terimakasih telah berjuang, belajar, berproses dan berkarya bersamaku.

MOTO

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.” (QS. 29:3)¹

“Barangsiapa menghendaki dunia maka ia harus mencapai dengan ilmunya, barangsiapa menghendaki akhirat maka dia harus mencapai dengan ilmunya, dan barangsiapa menghendaki keduanya, maka dia juga harus mencapai dengan ilmunya².”

Tiada satu usaha yang besar akan berhasil tanpa dimulai dari usaha yang kecil³.

¹Departemen Agama Republik Indonesia . 1998 . Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : PT Kumudasmoro Grafindo.

² Hadist Nabi Muhammad SAW Pengantar Filsafat. Bandung : PT Refika Aditama.

³ Joerniato, 1967 dalam Mulyon, E. 1998. Beberapa Permasalahan Implementasi Konvensi keanekaragaman Hayati dalam Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri. Tesis Magister, tidak dipublikasikan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRAMA ESTI MULYANTINI

NIM : 110910101028

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Keputusan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkan Kebijakan Maritim Tahun 2011” ini benar-benar hasil karya sendiri, keecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun. Karya tulis ini juga bukan merupakan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Januari 2019

Yang menyatakan,

Prama Esti Mulyantini

NIM 1109101028

SKRIPSI

**KEPUTUSAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
MENETAPKANKEBIJAKAN MARITIM TAHUN 2011**

Oleh

Prama Esti Mulyantini

NIM 110910101028

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Agung Purwanto, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Keputusan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkan Kebijakan Maritim Tahun 2011” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 04 Januari 2019

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D.
NIP. 196908151995121001

Sekretaris I,

Sekretaris II,

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D
NIP. 196802291998031001

Drs. Agung Purwanto, M.Si
NIP. 196810221993031002

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197212041999031004

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardianto, M.Si.
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Keputusan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkan Kebijakan Maritim Tahun 2011; Prama Esti Mulyantini; 110910101028; 2019; 81 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara maritim yang berbatasan dengan 5 daerah laut besar, yaitu Laut Bohai, Laut Kuning, Laut China Timur, Laut China Selatan dan daerah Laut Pasifik di Taiwan sebelah timur. Setelah Perang Dunia II berakhir, hak dan kepentingan maritim menjadi tujuan strategis jangka panjang di tahun mendatang. RRT mengembangkan dan menjaga daerah kemaritimannya dalam rangka pemanfaatan laut sebagai kepentingan negaranya melalui kebijakan maritim. Kebijakan maritim di RRT telah melalui beberapa tahap dari tahun ke tahun dan mengalami perubahan berdasarkan berbagai faktor yang ada di dalam atau di luar negeri RRT. Pada tahun 2011, pemerintah RRT menetapkan kebijakan maritim pada Pedoman Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok atau *12th Five Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China* tersebut dengan 1 bab yang berisi kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kekuatan maritim. Penetapan kebijakan maritim pada pedoman lima tahun tersebut merupakan upaya RRT dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Karya tulis ilmiah ini dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau bersifat sekunder. Data tersebut diperoleh dengan metode *library research* yang merupakan salah satu dari pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal, media cetak maupun *online*. Data-data tersebut dianalisis, kemudian dideskripsikan atau diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang sedang diteliti ini.

Hasil penelitian dari karya tulis ilmiah ini menemukan bahwa alasan yang mendasari RRT dalam menetapkan kebijakan maritimnya pada Pedoman Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok tahun 2011 hingga 2015, yaitu upaya dari pemerintah RRT dalam menjaga ketahanan pangan dan energi, nilai ekonomi, politik, adanya sengketa Laut China Selatan yang berkepanjangan, serta mewujudkan transparansi dalam pemerintahan RRT.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keputusan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkan Kebijakan Maritim Tahun 2011”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

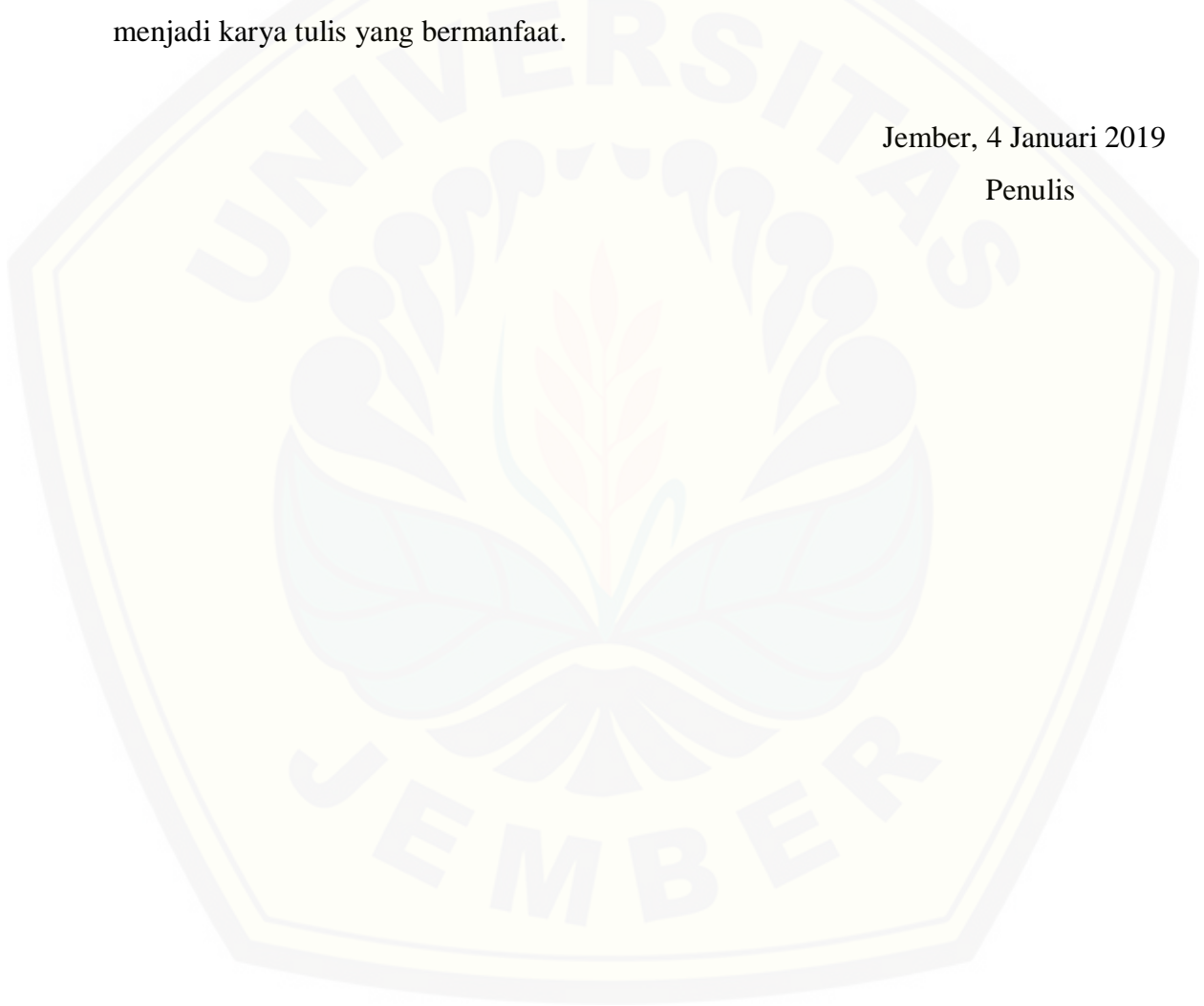
1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing; meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
3. Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
4. Drs. Agung Purwanto, M.Si selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam membantu penulis menyusun skripsi selama ini;
5. Agus Trihartono, S.Sos, MA., Ph.D., Dr. Muhammad Iqbal S.Sos., M.Si. dan Drs. Djoko Susilo, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan pada Karya Tulis Ilmiah ini;
6. Segenap Dosen dan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dengan segala ilmu dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama belajar di jurusan ini;

7. Pimpinan dan staf perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi karya tulis yang bermanfaat.

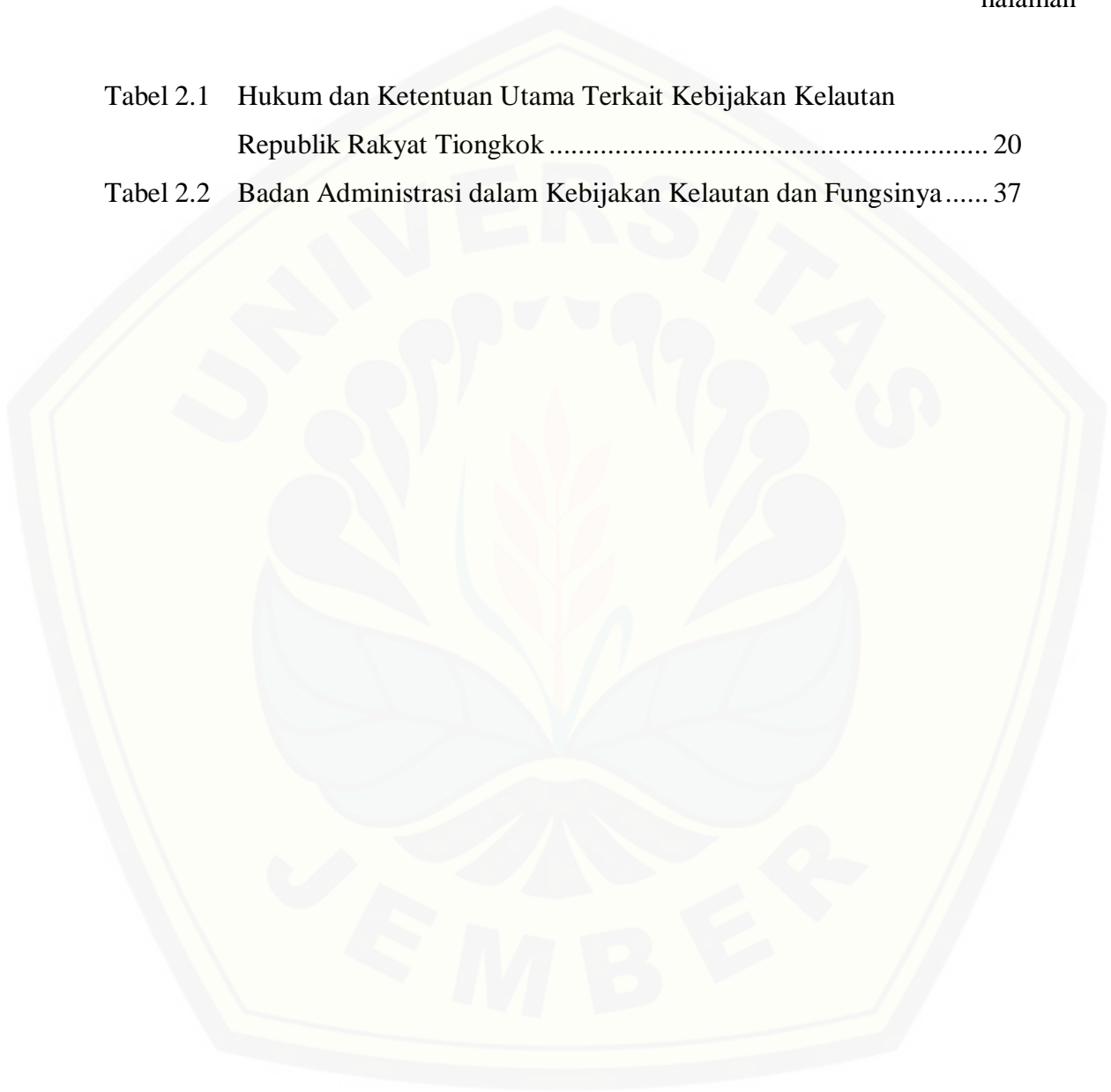
Jember, 4 Januari 2019

Penulis



DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Hukum dan Ketentuan Utama Terkait Kebijakan Kelautan Republik Rakyat Tiongkok	20
Tabel 2.2 Badan Administrasi dalam Kebijakan Kelautan dan Fungsinya	37



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Diagram Model Proses Pengambilan Keputusan Richard C. Snyder	11
Gambar 1.2 Diagram Alur Kerangka Pemikiran Berdasarkan Model Proses Pengambilan Keputusan Richard C. Snyder	13
Gambar 4.1 Diagram Impor dan ekspor makanan Republik Rakyat Tiongkok Tahun 1990–2014 (miliar USD).....	57
Gambar 4.1 Peta Laut China Selatan dan Negara yang Mengklaim Kepemilikan	64

DAFTAR SINGKATAN

- CNOOC : *China National Offshore Oil Corporation* (Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional China)
- COMRA : *China Ocean Minerals Research and Development Association* (Asosiasi Penelitian dan Pengembangan Mineral Kelautan)
- COSCO : *China Ocean Shipping (Group) Company* (Perusahaan Jasa Pengiriman Kelautan)
- CSCL : *China Shipping Container Lines* (Garis Pengiriman Kontainer China)
- CSIC : *the China Shipbuilding Industry Corporation* (Korporasi Industri Pembuatan Kapal China)
- DOC : *Code of Conduct* (Kode etik)
- ECAFE : *Economic Commission for Asia and the Far East* (Komisi Ekonomi untuk Asia dan Timur Jauh)
- ISA : *The International Seabed Authority* (Otoritas Dasar Laut Internasional)
- JOGMEC : *Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation* (Perusahaan Nasional Minyak, Gas, dan Logam Jepang)
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KIP : Keterbukaan Informasi Publik
- KRN : Kongres Rakyat Nasional
- MOFCOM : *Ministry of Commerce* (Kementerian Perdagangan)
- OGP : *Open Government Partnership* (Kemitraan Pemerintah Terbuka)
- OGI : *Open Government Information* (Informasi Pemerintah Terbuka)
- PLA : *People's Liberation Army* (Tentara Pembebasan Rakyat)
- NPC : *National People's Congress* (Kongres Rakyat Nasional)

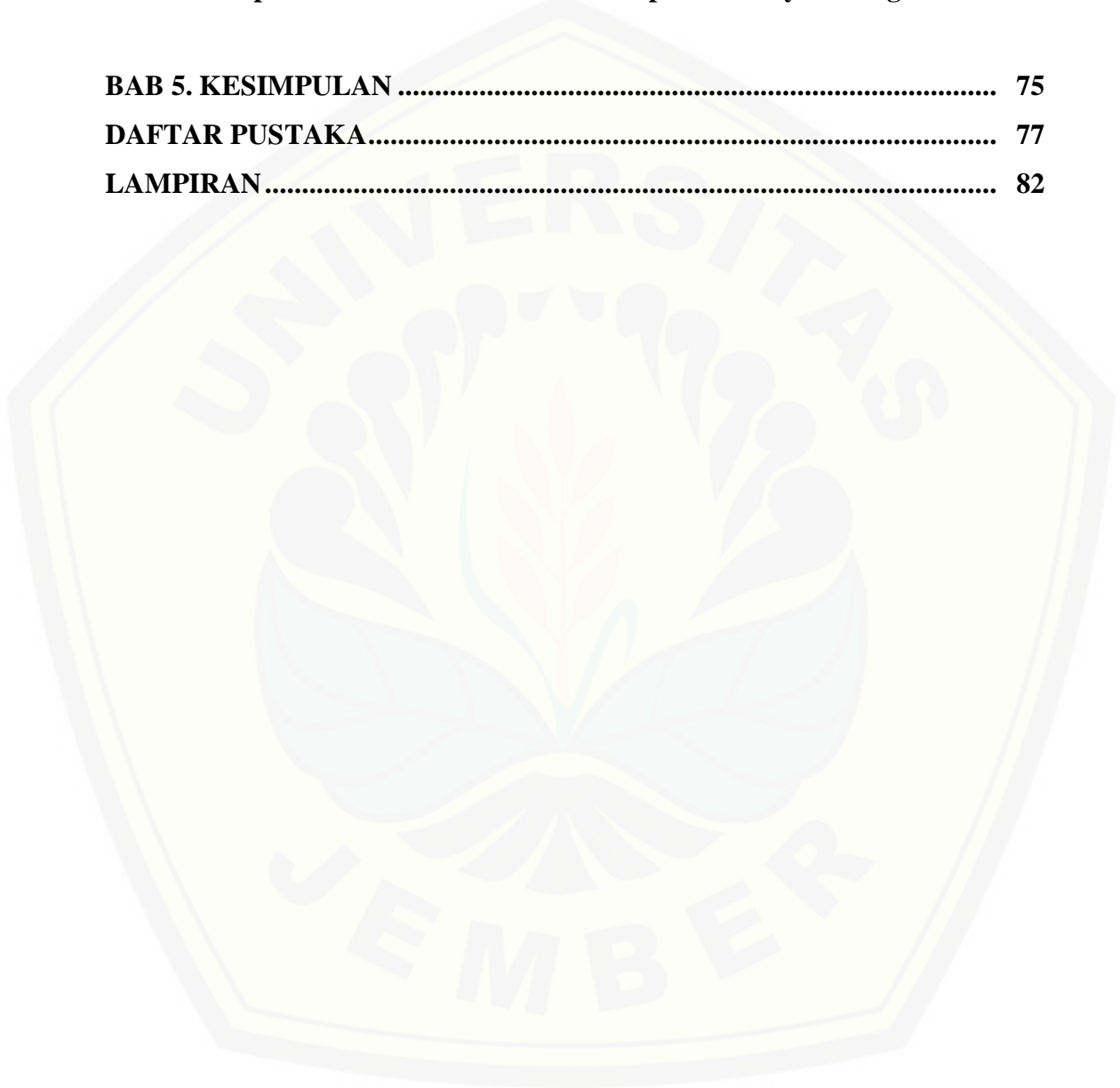
- PKC : Partai Komunis China
- PRC : *People's Republic of China* (RRT/Republik Rakyat Tiongkok)
- SOA : *State Oceanic Administration* (Administrasi Kelautan Negara)
- SLOCs : *Sea lines of communication* (Garis Komunikasi Laut)
- UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- UNESCO : *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa)
- ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PEMBIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1. Batasan Materi	6
1.2.2. Batasan Waktu	7
1.3. Rumusan Masalah	7
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Kerangka Teori	8
1.6. Argumen Utama	14
1.7. Metode Penelitian	15
1.7.1. Metode Pengumpulan Data	15
1.7.2. Metode Analisis Data	16
1.8. Sistematika Penulisan	16

BAB 2. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN MARITIM REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK	18
2.1. Periode Pemerintahan Mao Zedong	18
2.2. Periode Pemerintahan Liu Shaoqi	22
2.3. Periode Pemerintahan Song Qingling.....	23
2.4. Periode Pemerintahan Dong Biwu.....	24
2.5. Periode Pemerintahan Zhu De.....	25
2.6. Periode Pemerintahan Deng Xiaoping.....	25
2.7. Periode Pemerintahan Li Xiannian	27
2.8. Periode Pemerintahan Yang Shangkung.....	28
2.9. Periode Pemerintahan Jiang Zemin	29
2.10.Periode Pemerintahan Hu Jintao	34
2.11.Periode Pemerintahan Xi Jinping.....	44
BAB 3. SISTEM POLITIK DAN PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN MARITIM TIONGKOK TAHUN 2011	46
3.1.Sistem Politik Republik Rakyat Tiongkok	46
3.1.1. Peran dan Fungsi Kongres Rakyat Nasional	47
3.1.2. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional	49
3.1.3. Dewan Negara	51
3.2. Kebijakan Ekonomi Jangka Panjang Republik Rakyat Tiongkok	53
BAB 4. KEPUTUSAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENETAPKAN KEBIJAKAN MARITIM TAHUN 2011	56
4.1. Tantangan Ketahanan Pangan dan Energi	56
4.2. Nilai Ekonomi	58

4.3. Politik	61
4.4. Sengketa Laut China Selatan yang Berkepanjangan	63
4.5 Transparansi dalam Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok.	71
BAB 5. KESIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	82



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara yang memiliki garis pantai panjang. Garis pantai daratan Tiongkok sepanjang 18 ribu kilometer, dimulai dari mulut Sungai Yalu Propinsi Liaoning di utara sampai ke selatan di mulut Sungai Beilun di daerah Otonom Etnis Zhuang Guangxi. RRT berbatasan dengan 5 daerah laut besar antara lain Laut Bohai, Laut Kuning, Laut Timur, Laut Selatan dan daerah Laut Pasifik di Taiwan sebelah timur. Daerah perairan Tiongkok terdapat 5000 lebih pulau dengan areal total seluas 80 ribu kilometer persegi. Garis pantai pulau-pulau tersebut sepanjang 14 ribu kilometer, diantaranya pulau Taiwan yang memiliki luas 36 ribu kilometer persegi dan pulau Hainan seluas 34 ribu kilometer persegi. Pulau Diaoyu dan Pulau Chiwei di laut Pulau Taiwan sebelah timur laut adalah pulau-pulau Tiongkok di sebelah paling timur. Pulau-pulau, karang-karang dan pesisir yang tersebar di Laut Tiongkok Selatan dinamakan sebagai Kepulauan-kepulauan Laut Tiongkok Selatan yang terletak paling selatan di Tiongkok, masing-masing dinamakan Kepulauan Tungsha, Xisha, Zhongsha dan Nansha atau Kepulauan Timur, Barat, Tengah dan Selatan sesuai dengan letaknya yang berbeda (CRI).

Garis pantai yang panjang tersebut menjadikan RRT dikenal sebagai sebuah negara maritim. Kata “maritim” berasal dari kata *mare* (*marinus*; latin) bermakna daerah dekat dengan laut; navigasi, pasukan bersenjata atau angkatan laut, (*marinir*). Kata “*mare*” dibawa oleh orang-orang Iberia (Spanyol dan Portugis) kemudian Belanda untuk konsep laut bebas (*mare clausum*) dan laut terbuka (*mare liberum*) dalam konteks persaingan dan perebutan wilayah jajahan. Maritim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah *maritime* yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap laut adalah *sea power*. Istilah maritim dalam

pengertian khusus yaitu berhubungan dengan angkatan laut atau angkatan laut dalam hubungan dengan kekuatan darat dan udara, sedangkan dalam arti yang umum, yaitu angkatan laut dan semua kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan komersial non militer terhadap laut. Dengan demikian, dapat dikatakan kata “maritim” lebih merupakan pilar keras (*hard power*) sebuah negara dan oleh karena itu cocok dikaitkan dengan negara (negara maritim). Negara maritim merupakan negara yang berada dalam kawasan atau teritorial laut yang luas dan mampu menguasai wilayah tersebut. Konsep negara maritim adalah sebuah konsep yang mengedepankan untuk memanfaatkan semua sumber daya alam di wilayah laut untuk kepentingan rakyat dan memakmurkan sebuah negara.

Setelah Perang Dunia II berakhir, berbagai perang lokal dan pembicaraan mengenai batas di seluruh dunia berhenti sehingga hak dan kepentingan maritim yang akan menjadi tujuan penting di tahun-tahun mendatang. Adanya pergeseran maritim dalam modernisasi militer RRT yang muncul sebagai kekuatan global berikutnya. Berbeda dengan sebelumnya, upaya RRT untuk ekspansi maritim bukan disebabkan oleh motivasi terhadap ambisinya sendiri namun karena adanya situasi yang mendesak. Sebagai contoh yaitu tingkat konsumsi domestik yang berkembang pesat sehingga mendorong RRT mencari pengaruh lebih besar dan kontrol atas ruang dan sumber maritim. Selain itu klaim RRT terhadap Laut China Selatan menjadikan RRT semakin terlibat dalam sebagian besar sengketa maritim di kawasan Asia-Pasifik (Singh, 1999).

Suatu negara mengembangkan dan menjaga daerah kemaritimannya dalam rangka pemanfaatan laut sebagai kemakmuran bangsanya, serta untuk mengembangkan budaya yang tujuan akhirnya penguasaan laut nasional yang dapat dieksplorasi bagi kepentingan negara serta bangsanya. Negara dengan kekuatan ekonomi yang terus berkembang membuktikan bahwa kelanjutan kemajuan sebuah negara akan semakin bergantung pada perdagangan, angkatan laut dan ketersediaan

energi, serta eksploitasi sumber daya laut dan bawah laut yang pada akhirnya mampu membangun industri maritim yang tangguh.

Negara-negara di dunia menyakini bahwa maritim merupakan kekuatan utama suatu negara dalam hal transportasi perdagangan di laut karena sampai saat ini media transportasi perdagangan di dunia lebih banyak menggunakan jalur laut. Maritim yang terdiri dari lautan, pelabuhan, muara, kepulauan, dan daerah pesisir pantai yang telah mendukung perdagangan dunia. Sehingga negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk memperkuat maritimnya.

Sekretaris Jenderal Hu Jintao, pada Kongres Nasional ke-18 Partai Komunis Republik Rakyat Tiongkok tahun 2012 memberikan pernyataan bahwa RRT akan meningkatkan kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya laut, mengembangkan ekonomi kelautan, melindungi lingkungan ekologi laut, tegas melindungi hak dan kepentingan maritim RRT, dan membangun RRT menjadi kekuatan maritim. Laporan tersebut merupakan laporan terakhir Hu sebagai pemimpin Partai Komunis RRT sebelum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris umum dan ketua Komisi Militer Pusat yang kemudian digantikan oleh Xi Jinping. Transisi kepemimpinan tersebut pada dasarnya tidak mengubah komitmen untuk membangun RRT menjadi kekuatan maritim yang telah ditetapkan sebagai tujuan strategis jangka panjang.

Konsep “Kekuatan Maritim” menurut Liu Cigui sebagai direktur Administrasi Kelautan Negara bahwa membangun RRT menjadi kekuatan maritim merupakan jalur penting dalam perjalanan untuk pengembangan berkelanjutan dari bangsa RRT dan (pencapaian status) kekuatan global. Negara dengan kekuatan maritim adalah negara yang memiliki kekuatan komprehensif yang besar dalam hal pengembangan, pemanfaatan, perlindungan, manajemen, dan pengendalian laut (Cigui, 2012).

Kebijakan maritim suatu negara merupakan perwujudan dari strategi maritim negara tersebut. Kertas Putih Laporan Pembangunan Laut RRT tahun 2012 menjelaskan hubungan antara strategi dan kebijakan serta lingkup masing-masing

sebagai berikut: “Kebijakan Laut adalah kode perilaku yang ditetapkan untuk strategi negara, pedoman pembangunan dan hubungan eksternal mengenai laut, itu adalah kebijakan dasar mewujudkan niat dan kepentingan negara. Hal ini meliputi kebijakan tentang pengembangan dan penggunaan laut, termasuk pemanfaatan wilayah laut, pengembangan dan perlindungan pulau, perlindungan lingkungan laut, ilmu dan teknologi kelautan, industri kelautan, publisitas atau pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Industri kelautan meliputi bidang seperti transportasi, perjalanan atau pariwisata, perikanan, minyak dan gas, dan manufaktur peralatan teknik” (*China’s Ocean Development Report*, 2012:261).

Selama lebih dari 60 tahun sejak berdirinya RRT, kebijakan kelautan RRT belum dikembangkan dari awal secara komprehensif, tetapi telah melalui beberapa tahap. Domain maritim semakin penting dalam geopolitik kontemporer, namun pemerintah RRT pada awalnya tidak menyajikan strategi samudra nasional ke dalam kebijakannya. Banyaknya usulan kebijakan dan rekomendasi yang di buat sejak akhir 1990-an untuk menetapkan strategi maritim di Kongres Rakyat Nasional dan Konferensi Konsultatif Politik RRT, telah menghasilkan kemajuan dalam kebijakan strategis yang nyata untuk masa mendatang.

Aspek penting dari laut untuk pertama kalinya secara resmi diangkat pada Kongres Nasional Partai Komunis RRT, yang berdiri di puncak kepemimpinan politik RRT berada di Kongres ke-15 yang diadakan pada tahun 1997, pada masa kepemimpinan Jiang Zemin. Laporan Sekjen untuk kongres mencatat bahwa Laut merupakan elemen penting dari wilayah nasional dan sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kongres ke-16 yang diselenggarakan pada tahun 2002, Hu Jintao mengakui bahwa dibutuhkannya sebuah badan strategis untuk melaksanakan pembangunan maritim. Selanjutnya, pengakuan tersebut oleh Dewan Negara di wujudkan dalam Garis Besar Pedoman Pengembangan Ekonomi Kelautan Nasional yang diterapkan pada tahun berikutnya dan menyatakan bahwa RRT akan membangun dirinya menjadi sebuah kekuatan maritim secara bertahap. Pada

pembukaan kongres ke-18 yang diselenggarakan tahun 2012, tercatat bahwa membangun RRT menjadi kekuatan maritim telah dijadikan sebagai tujuan strategis. Dalam hal ini, istilah “kekuatan maritim” inilah yang pertama kalinya ditetapkan oleh pemerintah RRT dalam dokumen resmi negara.

Dasar kebijakan pemerintah RRT ditentukan berdasarkan pedoman lima tahun yang disusun sesuai dengan program strategis yang ditetapkan oleh Partai Komunis RRT dan secara resmi disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional. Pedoman Lima Tahun ke-11 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok (*11th Five Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China*) tahun 2006 sampai tahun 2011, hanya memiliki satu bagian tentang laut, tetapi kebijakan Pedoman Lima Tahun Ke-12 (*12th Five Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China*) dengan rentang waktu antara tahun 2011 sampai tahun 2015, memiliki 1 bab yang secara keseluruhan bersubyek pada mempromosikan pembangunan ekonomi kelautan (Masuda, 2012:61). Hal ini telah diikuti oleh penyusunan yang lebih rinci oleh berbagai badan pemerintah dan disetujui oleh Dewan Negara, termasuk pedoman lima tahun untuk operasi maritim, untuk pembangunan ekonomi kelautan, dan untuk pengembangan ilmu dan teknologi kelautan. Namun, isi dari pedoman rinci tersebut tidak dirilis secara penuh.

Pada Pedoman Lima Tahun Keduabelas berisikan bab baru yang disebut “Promosikan Pembangunan Ekonomi Kelautan” dan ditetapkannya sebagai pedoman kebijakan untuk “mengembangkan dan menerapkan strategi pengembangan laut berdasarkan pada laut dan perencanaan lahan terpadu, serta meningkatkan pengembangan dan kemampuan pengendalian laut” (Xinhua, 2011). Strategi pengembangan laut tersebut menekankan pada pentingnya domain maritim dalam konteks pembangunan ekonomi. Selain itu, RRT berkeinginan untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya laut untuk tujuan mengamankan energi dan memaparkan mengenai “strategi pembangunan kelautan” dalam Pedoman

Lima Tahun Keduabelas (Masuda, 2012:61). Pedoman Lima Tahun Ke-12 merupakan perpanjangan dari upaya pemerintah RRT dan juga didukung oleh kemajuan yang dibuat dalam teknologi yang relevan dengan pembangunan maritim (Masuda, 2012:64).

Langkah RRT yang berkaitan dengan maritim merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena RRT merupakan negara dengan daratan maritim terbesar di kawasan Asia-Pasifik dan secara historis memiliki peran penting dalam peradaban kemaritiman dunia. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas keputusan Republik Rakyat Tiongkok menetapkan kebijakan maritim tahun 2011, karena dengan adanya pembahasan tersebut, penulis akan mampu menjelaskan bagaimana sebuah negara merumuskan sebuah kebijakan dan hal apa saja yang mempengaruhi sebuah negara dalam menetapkan kebijakannya. Dengan demikian, penulis mengambil judul:

**“KEPUTUSAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENETAPKAN
KEBIJAKAN MARITIM TAHUN 2011”**

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan guna memberikan arahan yang jelas mengenai materi bahasan dan rentang waktu yang dipakai agar tetap fokus bagi penulis dalam melakukan analisis. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memformulasikan jawaban yang sesuai dan menghindari terjadinya bias atau penyimpangan dari tema bahasan yang telah ditentukan. Ruang lingkup pembahasan ini dibagi menjadi dua, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi diperlukan guna menunjuk fokus atau pokok bahasan yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya tulis ilmiah. Penulis membatasi materi penelitiannya pada kebijakan maritim Republik Rakyat Tiongkok tahun 2011. Hal-hal

yang dibahas adalah gambaran umum mengenai perkembangan kebijakan maritim RRT; sistem politik dan proses pengambilan kebijakan maritim; dan faktor yang menjadi alasan pemerintah RRT menetapkan kebijakan maritim tahun 2011.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu merupakan rentangan waktu yang akan menjadi fokus kajian penulis. Rentang waktu dalam karya tulis ilmiah ini dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penulis memilih tahun 2011 tersebut karena kebijakan lima tahunan yang dibuat oleh pemerintah RRT yang ke-12 memiliki rentang tahun 2011 sampai 2015. Selain itu pada tahun 2012 merupakan awal mula ditetapkannya istilah “kekuatan maritim” dalam dokumen resmi yang tercatat pada pembukaan Kongres ke-18 dari Partai Komunis RRT. Walaupun penulis telah menetapkan batasan waktu dalam penelitian ini, penulis juga akan menambahkan beberapa data faktual lainnya guna memperkuat argumen penulis terkait dengan kepentingan penulisan karya tulis ini.

1.3 Rumusan Masalah

Wardhono *et al.* (2011:21) menyatakan rumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Rumusan masalah digunakan untuk mendasari penulis dalam menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk karya ilmiah. Selanjutnya, dari rumusan masalah akan dapat diketahui tujuan penulisan yang menjadi fokus pada permasalahan dan ruang lingkup pembahasan. Rumusan masalah yang diambil penulis dalam karya tulis ini yaitu:

“Apa Alasan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkan Kebijakan Maritim Tahun 2011?”

1.4 Tujuan Penelitian

Menurut Wardhono *et al.* (2011:21), tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi sementara dari asumsi. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok menetapkan kebijakan maritim tahun 2011.

1.5 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena di samping berguna untuk menjelaskan permasalahan dan menghindari adanya bias, juga untuk menyusun hipotesa. Selain itu, kerangka teori bisa dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam proses pengujian data, untuk menganalisa suatu masalah yang akan dibahas. Hal ini akan menghindari terjadinya anomali terhadap hasil kesimpulan yang nantinya diperoleh, dan membawa pada kesimpulan dan solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. Pemilihan teori atau konsep disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Menurut Mochtar Mas'oeed (1990:93,94), konsep adalah abstraksi atau ringkasan yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu, dengan konsekuensi perbedaan khas tiap obyek akan hilang, karena tiap obyek yang diabstraksi dianggap identik.

Teori yang digunakan penulis dalam menganalisis karya ilmiah ini yaitu menggunakan teori Pengambilan Keputusan. Teori Pengambilan Keputusan pada dasarnya merupakan perilaku atau sikap dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara. Tindakan atau sikap suatu negara tersebut adalah bentuk keputusan yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan kebijakan suatu negara dapat dianalisa dengan *decision making process*.

Menurut Richard C. Snyder, negara adalah aktor dari setiap situasi yang hadir dalam sebuah kebijakan negara dimana tindakan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan merupakan tindakan yang mengatas namakan negara. Teori kebijakan luar negeri Snyder yang sering dikenal adalah *decision making process*, dimana pendekatan eksternal dan internal menjadi acuannya. Proses pengambilan keputusan dimaksudkan untuk mengetahui apakah keputusan itu dapat mempengaruhi hasil atau tidak dan untuk mengetahui apakah perbedaan proses pembuatan keputusan juga akan menghasilkan keputusan yang juga berbeda dan apakah keterlibatan individu atau kelompok juga dapat mempengaruhi suatu hasil dari keputusan.

Snyder mengemukakan bahwa berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Peranan kepemimpinan, persepsi dan sistem kepercayaan adat para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan mereka. Ada beberapa faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara. Penelitian Snyder juga mempertimbangkan karakteristik situasional ketika pengambilan keputusan sedang berlangsung, misalnya apakah proses pengambilan keputusan itu dibuat dalam situasi tertekan, krisis atau beresiko (Perwita dan Yani, 2005:64).

Pada teori ini terdapat prosedur yang dikemukakan oleh Snyder yaitu faktor apapun yang menjadi determinan dalam politik luar negeri akan diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan. Kelebihan dari model ini yaitu dimensi manusia dianggap lebih efektif dari politik luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, faktor-faktor penting yang dapat menjelaskan pilihan-pilihan politik luar negeri, antara lain (Perwita dan Yani, 2005:65):

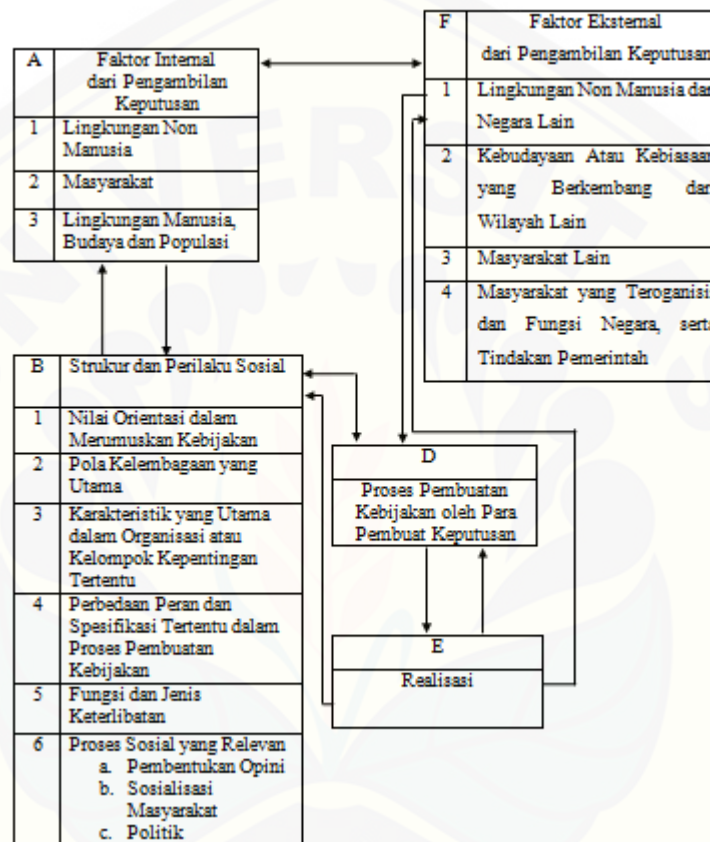
- a. motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma yang dianut), merupakan suatu dorongan untuk menggunakan kesempatan yang dimiliki dan menekankan mengapa suatu keputusan tersebut diambil.

- b. arus informasi diantara mereka (jaringan informasi), untuk mengetahui sumber-sumber yang dapat menjadi masukan bagi perumusan politik dan kebijakan luar negeri.
- c. pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri, menekankan tentang persepsi mengenai lingkungan internasional yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, akan banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suatu aktor. Kerangka variabel yang dimaksud adalah lingkungan eksternal dan lingkungan internal yang melekat pada aktor, termasuk juga struktur sosial dan perilaku. Variabel-variabel tersebut dibagi menjadi beberapa poin, yang membuat teori tersebut menjadi lebih kompleks (lihat Gambar 1.1).

Pada awalnya, proses pengambilan keputusan luar negeri juga sering diidentikan dengan mekanisme yang terjadi dalam sistem politik yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk juga mempengaruhi lingkungan dalam rangka mencapai tujuan. Interaksi yang terjadi dalam bentuk masukan dan keluaran (*inputs dan outputs*). Segala sesuatu yang timbul dari dalam lingkungan dan mempengaruhi suatu kebijakan politik dipandang sebagai masukan-masukan (*inputs*), sedangkan hasil yang dikeluarkan oleh sistem politik yang merupakan tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan dipandang sebagai keluaran (*outputs*). Proses pengambilan keputusan Snyder, menggunakan faktor internal dan eksternal dimana dalam faktor-faktor tersebut di perinci lagi dengan beberapa pendekatan, antara lain:

Gambar 1.1 Diagram Model Proses Pengambilan Keputusan Richard C. Snyder (Sumber: Snyder *et al.* (1962:200))



Menurut gambar diatas, pembuatan kebijakan atau *decision making* merupakan proses atau situasi yang terdiri dari kombinasi selektif faktor yang relevan dalam pengaturan internal dan eksternal sebagai hasil dari penafsiran oleh para pengambil keputusan. Diagram ini dirancang hanya untuk menjadi rancangan awal sebuah proses kebijakan. Terdapat tiga faktor utama dalam pembuatan kebijakan menurut Snyder yaitu faktor internal pengambilan keputusan, faktor eksternal pengambilan keputusan, dan struktur dan perilaku sosial.

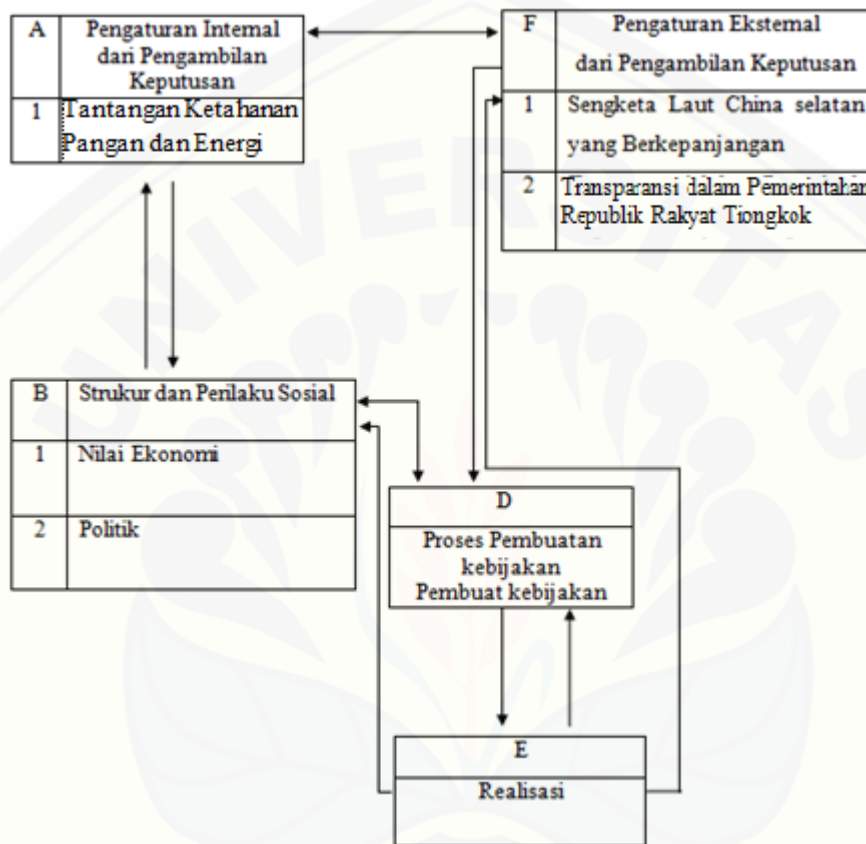
Pada faktor internal terdapat tiga hal pokok dalam pengaturan pengambilan kebijakan secara internal, yaitu lingkungan non manusia; masyarakat; lingkungan manusia, budaya dan populasi. Dalam hal ini, faktor internal bagi suatu negara akan mempertimbangkan aspek masyarakat yaitu tuntutan masyarakat, kebudayaan atau kebiasaan dari masyarakat serta perilaku masyarakat itu sendiri terhadap isu yang akan dibicarakan dalam proses pembuatan kebijakan oleh para pembuat kebijakan.

Pada faktor eksternal terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan oleh suatu negara yaitu lingkungan non manusia dari negara lain, kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang dari wilayah lain, masyarakat lain, masyarakat yang terorganisir dan fungsi negara serta tindakan pemerintah. Dalam hal ini, adanya tuntutan masyarakat atau organisasi atau kelompok tertentu mengenai isu yang dibahas dalam pembuatan kebijakan, tuntutan tersebut menjadi sebuah acuan bagi para pembuat kebijakan yang sedang diproses.

Pada faktor struktur dan perilaku sosial, posisi para pembuat kebijakan atau negara dalam struktur sosial dan sikap juga berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan. Para pembuat kebijakan harus memiliki persamaan mendasar nilai orientasi, pola kelembagaan dan karakteristik yang utama dalam merumuskan kebijakan serta memiliki proses sosial yang relevan yaitu memiliki formasi atau bentuk pendapat tersendiri dan politik.

Struktur dan perilaku sosial saling mempengaruhi faktor internal para pembuatan kebijakan pada bagian kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hasil dari proses pembuatan kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi faktor eksternal dari isu yang dibahas para pembuat kebijakan tersebut, ketika kebijakan yang telah disepakati telah diimplementasikan. Kebijakan yang dihasilkan akan turut mempengaruhi perilaku dan struktur sosial dari pembuat kebijakan dalam politik internasional dimana mereka melibatkan diri.

Gambar 1.2. Diagram Alur Kerangka Pemikiran Berdasarkan Model Proses Pengambilan Keputusan Richard C. Snyder



1) Faktor Internal

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Snyder, faktor internal yang mempengaruhi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam menetapkan kebijakan maritimnya tahun 2011 diantaranya kondisi dalam negeri berupaya menjaga ketahanan pangan dan energi (lihat Gambar 1.2).

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor atau keadaan di luar negara yang mempengaruhi sebuah kebijakan yang akan dan telah berlangsung. Faktor tersebut bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Snyder, faktor eksternal yang mempengaruhi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam menetapkan kebijakan maritimnya tahun 2011 yaitu sengketa Laut China Selatan yang berkepanjangan dan upaya mewujudkan transparansi dalam pemerintahan RRT (lihat Gambar 1.2).

3) Struktur dan Perilaku Sosial

Struktur dan perilaku sosial saling mempengaruhi faktor internal para pembuat kebijakan pada bagian kebudayaan atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Snyder, faktor struktur dan perilaku sosial yang mempengaruhi pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dalam menetapkan kebijakan maritimnya tahun 2011 diantaranya adanya nilai ekonomi dan politik.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama adalah dugaan atau jawaban sementara dari analisa permasalahan penelitian. Mengacu pada latar pada latar belakang, rumusan masalah, dan konsep yang telah dipaparkan, maka argumen utama penulis adalah sebagai berikut:

Pedoman Lima Tahun ke-12 Republik Rakyat Tiongkok merupakan upaya pemerintah RRT dalam memperluas kekuasaan maritimnya guna mengoptimalkan sumber daya kelautan dengan cara memperkuat pengembangan dan pembangunan maritim. Pemerintah RRT menetapkan kebijakan maritim pada Pedoman Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan sosial Nasional tahun 2011 karena adanya

pengaruh dari berbagai faktor, baik faktor internal, faktor struktur dan perilaku sosial serta faktor eksternal. Dalam hal ini, faktor internal yang mempengaruhi penetapan kebijakan RRT adalah upaya pemerintah RRT dalam menjaga ketahanan pangan dan energi. Pada faktor struktur dan perilaku sosial, hal yang mempengaruhi penetapan kebijakan tersebut yaitu adanya nilai ekonomi dan politik. Pada faktor eksternal, hal yang mempengaruhi penetapan kebijakan tersebut yaitu sengketa Laut China Selatan yang berkepanjangan dan upaya transparansi dalam pemerintahan RRT. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok telah membuat keputusan dengan menetapkan kebijakan maritimnya pada Pedoman Lima Tahun ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan sosial Nasional tahun 2011 sampai dengan 2015 dikarenakan adanya sebuah alternatif, yaitu ekonomi.

1.7 Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena merupakan syarat untuk melakukan penelitian. Penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan kerangka berfikir dan data-data yang dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar karya tulis menjadi ilmiah, sistematis dan kronologis. Metode penelitian yang dilakukan penulis mencakup pengumpulan data dan analisis data yang merupakan hasil akhirnya.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Karya ilmiah ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data lebih terfokus pada informasi-informasi atau kajian yang diperoleh dari buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan informasi dari instansi-instansi yang terkait dengan bidang tertentu. Selain itu, data-data yang diperoleh juga berasal dari media internet yang bisa memberikan informasi lebih menunjang bagi suatu analisis. Hal ini berarti sumber yang digunakan adalah sumber data sekunder yang artinya penulis tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian.

Oleh sebab itu, guna mendapatkan data yang valid dan mencukupi, penulis menggunakan beberapa pusat informasi antara lain :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- c. Buku-buku koleksi pribadi
- d. Media Internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data ditunjukkan guna mendapatkan kesimpulan yang objektif dan ilmiah. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti dalam ilmu sosial, dengan penekanan objek penelitiannya terhadap keunikan manusia atau gejala sosial yang tidak dapat di analisa dengan metode statistik. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat atas data dan fakta yang telah terkumpul untuk diteliti dengan dilakukan pemilahan data, pengkajian dan interpretasi terlebih dahulu. Kemudian untuk menganalisis data dan permasalahan yang ada penulis menggunakan teknik berpikir induktif. Induktif merupakan teknik berpikir dari hal-hal yang bersifat khusus berupa data dan fakta yang telah terkumpul kemudian didapatkan hasil yang bersifat umum atau didapatkan hasil kesimpulan.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membaginya menjadi 5 bab yang mana setiap bab memiliki sub bab yang saling berhubungan, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan penjelasan dan uraian Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Pembahasan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori, Argumen Utama, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perkembangan Kebijakan Maritim Republik Rakyat Tiongkok

Bab ini berisikan mengenai perkembangan kebijakan maritim Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan pada periode-periode kepemimpinan.

Bab III Sistem Politik dan Proses Pengambilan Kebijakan Maritim Republik Rakyat Tiongkok

Bab ini berisikan penjelasan dan uraian mengenai sistem politik dan mekanisme pengambilan kebijakan maritim Republik Rakyat Tiongkok.

Bab IV Keputusan Republik Rakyat Tiongkok Menetapkan Kebijakan Maritim Tahun 2011

Bab ini berisikan tentang analisa mengenai alasan internal, struktur dan perilaku sosial, serta eksternal Republik Rakyat Tiongkok menetapkan kebijakan maritim tahun 2011 berdasarkan teori pengambilan keputusan Richard C. Snyder.

Bab V Penutup

Bab ini akan memuat kesimpulan yang diambil oleh penulis dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan penutup dari serangkaian tulisan ini.

BAB 2. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN MARITIM REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

2.1 Periode Pemerintahan Mao Zedong

Mao Zedong merupakan Pimpinan Pusat Pemerintahan Rakyat untuk RRT pada tahun 1949 sampai 1954 dan menjabat pada periode selanjutnya sebagai Pimpinan RRT 1954 sampai 1958. Periode ini berawal dari tanggal 1 Oktober 1949 ketika Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dari menara gerbang di Lapangan Tiananmen. Kondisi dalam negeri pada saat itu seperti “setiap sektor menunggu pengembangan” dan “mulai dari awal”. Sejarah resmi kebijakan laut RRT berfokus pada bidang berikut, berpusat pada langkah awal menuju kolektivisasi dan pengenalan ekonomi terencana yang mana kegiatan dibawah kendali langsung atau operasi langsung oleh pemerintah yang secara bertahap menempatkan dasar bagi kekuatan laut RRT, antara lain (*China Social Sciences Press: 1985: 12-16*):

- a. Perikanan laut (pembentukan sebuah perusahaan penangkapan ikan dan komune penangkapan ikan)
- b. Pembuatan garam pesisir (nasionalisasi garam)
- c. Reklamasi lahan basah pesisir (pengembangan lahan untuk pertanian negara)
- d. Transportasi laut (penggantian dari Perusahaan Navigasi Uap Pedagang RRT, pendirian perusahaan kapal dagang laut dalam bekerja sama dengan Polandia)
- e. Pembuatan kapal (pembuatan kapal kargo di Dalian dan Shanghai)
- f. Pelabuhan (pembangunan dan perluasan pelabuhan baru Tanggudi Tianjin dan Zhanjiang di Guangdong)
- g. Pendidikan (mendirikan Perguruan Tinggi Perikanan Shanghai dan Perguruan Tinggi lainnya)
- h. Penelitian ilmiah (menciptakan Akademi Ilmu Pengetahuan Laboratorium Biologi Laut RRT)

Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan Deklarasi Pemerintah Mengenai Laut Teritorial pada September 1958. Deklarasi ini menyatakan bahwa wilayah laut RRT diperpanjang untuk jarak 12 mil laut dari garis pangkal lurus, berlaku untuk semua wilayah RRT, termasuk daratan dan pesisir pulau, Taiwan (terpisah dari daratan oleh laut terbuka) dan pulau-pulau di sekitarnya, Kepulauan Penghu, Kepulauan Dongsha/Pratas, Kepulauan Xisha/Paracel, Kepulauan Zhongsha, Kepulauan Nansha/Spratly, dan semua pulau-pulau lain milik RRT. Namun, deklarasi ini tidak secara eksplisit mengklaim kepulauan Senkaku (disebut Kepulauan Diaoyu oleh RRT dan Tiaoyutai oleh Taiwan) sebagai wilayah RRT.

Deklarasi tersebut dikeluarkan pada saat Kedua Selat Taiwan Krisis, ketika PLA membombardir pulau Quemoy. Penekanan strategis pada saat ini berada di perjuangan dengan pemerintahan Nasionalis Chiang Kai-Shek (1887-1975) dan RRT yang diperlukan untuk mencegah Angkatan Laut AS *Seventh Fleet* mendekati pantai dan melakukan intervensi. Deklarasi ini sejalan dengan agenda negara-negara berkembang yang pada saat itu mendorong perluasan lingkup wilayah perairan di konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut di Jenewa, tetapi prioritas utama bagi RRT adalah keamanan laut.

Periode pemerintahan Mao Zedong ini dikenal dengan periode yang membawa beberapa gerakan awal terhadap kebijakan laut RRT di masa depan terkait dengan pembentukan administrasi kelautan negara. Zhu Kezheng (Coching Chu, 1890-1974), merupakan seorang meteorologi RRT yang terkenal secara internasional, sebuah Kantor Bagian Kelautan didirikan dalam Komite Perencanaan Sains (pelopor Komisi Sains dan Teknologi Negara, yang kemudian menjadi Kementerian Sains dan Teknologi) pada Tahun 1956. Dalam hal ini, termasuk tujuh sub bagian khusus di bidang fisika; laut dalam dan samudera; hidrometeorologi; kimia; biologi; geologi/geomorfologi; dan instrumen pengamatan.

Revolusi kebudayaan yang dipimpin oleh Ketua Partai Komunis RRT, Mao Zedong terjadi pada tahun 1966 sampai 1976 yang bertujuan menyajikan ideologi

komunis dengan menghilangkan sisa-sisa unsur kapitalis dan tradisional dari masyarakat RRT dan mendirikan kembali pemikiran Maois sebagai dominan pada Partai tersebut. Gerakan sosiopolitik tersebut telah menjadikan gejolak politik yang berdampak negatif bagi ekonomi dan masyarakat RRT, termasuk juga kebijakan pemerintah mengenai laut.

Kebijakan pemerintah mengenai perikanan laut pada waktu itu memiliki slogan “lebih banyak kapal berarti lebih banyak produksi” sehingga menyebabkan *overbuilding* dari kapal nelayan dan menyebabkan sumber daya perikanan habis. Pada bidang lain, di daerah-daerah reklamasi daratan berfokus pada produksi pangan, sementara pertimbangan lain, seperti budidaya, produksi alang-alang untuk pembuatan kertas, dan kegiatan untuk perlindungan lingkungan, seperti penanaman pohon sebagai penahan angin telah diabaikan dan pada akhirnya upaya untuk memproduksi makanan pokok mengalami kegagalan.

RRT mengalami perubahan dari pengabaian hukum yang berlaku selama Revolusi Kebudayaan, beralih ke postur menggunakan hukum sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan untuk mendorong perubahan dalam struktur industri. Selama periode ini, sistem perundang-undangan dalam bidang kebijakan laut menjadi semakin baik untuk tingkat tertentu (lihat tabel 2.1).

Tabel 2.1 Hukum dan Ketentuan Utama Terkait Kebijakan Kelautan Republik Rakyat Tiongkok (Sumber: Jun'ichi (2014: 12-13))

Kategori	Nama	Tahun diumumkan secara resmi (diterbitkan)	Yang berwenang membentuk atau mengesahkan
Hukum dasar, Kebijakan Eksternal	Deklarasi tentang Teritorial Laut China	1958	Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
	Hukum Teritorial Laut dan Perbatasan Wilayah	1992	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional

	Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)	1996 (disahkan)	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
	Deklarasi tentang Garis Dasar Laut Teritorial	1996	Dewan Negara
	Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinental	1998	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
	Deklarasi tentang Garis Dasar Laut Teritorial Diaoyu dan Kepulauan Afiliasinya	2012	Dewan Negara
Administrasi Wilayah Laut	UU tentang Administrasi Penggunaan Wilayah Laut	2001	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
	Hukum Perlindungan Pulau	2009	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
Pengembangan dan perlindungan Laut	Peraturan tentang Kerjasama Eksploitasi Sumber Daya Minyak Bumi Lepas Pantai dengan Perusahaan Asing	1982	Dewan Negara
	Peraturan untuk Perlindungan dari Propagasi Sumber daya Perikanan	1979	Dewan Negara
	Hukum Perikanan	1986	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
	Peraturan untuk Pengelolaan Industri Garam	2005	Dewan Negara
Perlindungan Lingkungan Laut	Hukum Perlindungan Lingkungan Laut	1982	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
	Peraturan Perlindungan Lingkungan Lepas Pantai dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak	1983	Dewan Negara
	Peraturan tentang	1985	Dewan Negara

	Kontrol dari Pembuangan Limbah di Lautan		
	Peraturan tentang Pencegahan dan Pengendalian Lingkungan Hidup dari Kapal yang menyebabkan Polusi Laut	2009	Dewan Negara
Keamanan Lalu Lintas Maritim	Hukum Keselamatan Lalu Lintas Maritim	1983	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional
	Hukum Pelabuhan	2003	Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional

2.2 Periode Pemerintahan Liu Shaoqi

Liu Shaoqi merupakan Pimpinan RRT yang memerintah pada 2 periode yaitu tahun 1959 sampai dengan 1964 dan tahun 1964 sampai dengan 1968. Periode ini pada dasarnya melanjutkan kebijakan maritim Mao Zedong sebelumnya. Pada tahun 1959, sejumlah organisasi baru didirikan, termasuk Perguruan Tinggi Oseanologi Shandong (sekarang Universitas Kelautan China, yang terletak di Qingdao), Institut Oseanologi (Qingdao) dan Institut Oseanologi Laut China Selatan (Guangzhou) di bawah Chinese Academy of Sciences, dan lembaga oseanologi di bawah Jaminan Departemen Navigasi Angkatan Laut Markas China (Keempat Institut Penelitian Angkatan Laut, Qingdao), menangani kegiatan hidrografi. Organisasi baru memulai survei komprehensif di Laut Bohai, Laut Kuning, dan Laut China Timur pada tahun 1958 dan di Laut China Selatan pada tahun berikutnya. Dalam hal ini, operasi dilakukan oleh Angkatan Laut.

Perpanjangan pergerakan selanjutnya yaitu dibentuknya State Oceanic Administration (SOA) yang didirikan pada tanggal 22 Juli 1964, sebagai organ langsung di bawah Dewan Negara. Lembaga Kelautan Angkatan Laut dan skuadron survei kelautan dialihkan ke SOA baru dengan persetujuan Departemen Staf Umum

PLA seperti Bagian Kantor Oceanic Sains dan Teknologi Komisi Negara. Tahun berikutnya tiga biro yang dibentuk dalam SOA, yaitu Biro Laut Utara di Qingdao, Biro Laut Timur di Ningbo, Provinsi Zhejiang (kemudian pindah ke Shanghai), dan Biro Laut Selatan di Guangzhou. SOA dioperasikan stasiun pantai dan memberikan prediksi untuk pasang, cuaca pesisir, dan kondisi gelombang. Armada kapal survei, beberapa dipindahkan ke angkatan laut dan mengembangkan instrumen observasi bersama-sama dengan organisasi lain, terutama pelayanan pertama pembangunan mesin. Peran lembaga tersebut didefinisikan sebagai pelayanan dalam pembangunan pertahanan nasional dan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan tugas yang ditugaskan oleh Dewan Negara (Wenhe, Boyong, eds., 2003:88).

Di bidang transportasi laut, selain China Ocean Shipping (Group) Company, atau COSCO, yang telah didirikan pada tahun 1961, China Shipping Container Lines (CSCL) didirikan sebagai anak perusahaan dari China Shipping Group pada tahun 1997, menciptakan setup dengan dua perusahaan besar. Pemerintah mengadopsi dua kebijakan yang kuat, yaitu membangun kapal RRT dan kedua pengiriman barang RRT di kapal RRT. Ini menciptakan siklus positif dari penguatan, mendukung pertumbuhan yang dipicu ekspor ekonomi RRT dan menghasilkan kemajuan lebih lanjut dalam pembuatan kapal dan transportasi laut.

2.3 Periode Pemerintahan Song Qingling

Pada tahun 1968 terjadi transisi pemerintahan, tidak ada pengganti Liu Shaoqi, maka wakil ketua menjadi pimpinan negara sementara. Song Qingling memimpin RRT pada tahun 1968 sampai dengan 1972. Pada periode ini survei kelautan menerima perlindungan besar bahkan selama periode kekacauan tersebut. SOA dilengkapi dengan sejumlah kapal tambahan, termasuk Shijian kapal survei 3.167 ton dibangun RRT, pada tahun 1969, dan 13.650 ton Xiangyanghong 05, sebuah kapal barang Polandia dikonversi, pada tahun 1972.

Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi RRT memungkinkan untuk muncul sebagai kekuatan besar dan menjadi lebih aktif dalam mengejar hak-hak dan kepentingan maritim, termasuk kedaulatan atas pulau-pulau dan yurisdiksi atas perairan. RRT mengadopsi postur jelas guna memaksimalkan politik, keamanan, dan kepentingan ekonomi dengan menafsirkan dan mengutip konsep dan ketentuan UNCLOS untuk keuntungan sendiri.

RRT mulai menekan klaimnya ke Kepulauan Diaoyu pada tahun 1970 dan Departemen Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pulau Diaoyu dan pulau-pulau lainnya, seperti Huangwei Islet (disebut Kubashima dalam bahasa Jepang), Chiwei Islet (Taishoto), Pulau Nanxiao, dan Pulau Beixiao, milik Taiwan. Seperti Taiwan, mereka telah menjadi bagian integral dari wilayah RRT sejak lama. RRT akan membebaskan Taiwan dengan memulihkan Diaoyu dan pulau-pulau lainnya milik Taiwan tanpa gagal.

RRT mulai menekan klaim dan Jepang telah menganalisis upaya itu terkait dengan hasil penyelidikan ilmiah yang menyimpulkan ada cadangan besar minyak dan gas di Laut China Timur dan khususnya di landas kontinen utara dari Taiwan, seperti dilansir PBB Ekonomi Komisi untuk Asia dan Timur Jauh atau *Economic Commission for Asia and the Far East* (ECAFE) pada tahun 1969.

2.4 Periode Pemerintahan Dong Biwu

Dong Biwu merupakan wakil ketua umum RRT yang menjadi pimpinan negara sementara setelah Song Qingling pada tahun 1972 sampai dengan 1975. Periode ini melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dan perkembangan kebijakan maritim kurang signifikan. Pada periode ini poin pertama yang perlu diketahui untuk perubahan meningkatnya kerangka hukum adalah penegasan tentang perlindungan lingkungan laut dan ekosistem. Pada tahun 1974, SOA melakukan penyelidikan intermiten polusi di Laut kuning, Laut China Timur dan Laut China Selatan. Jiaozhou Bay (Qingdao) melaporkan bahwa 40% dari luas wilayah perairan dangkal yang

digunakan untuk budidaya telah tercemar dan minyak yang berbau serta racun pada *seafood* (*Oceanic Activity in Contemporary China*, 333).

2.5 Periode Pemerintahan Zhu De

Pada tahun 1975 jabatan ketua umum dihapus secara resmi dan fungsi pemimpin negara dipindah secara resmi kepada Ketua Umum Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional. Periode kepemimpinan Zhu De merupakan periode kepemimpinan RRT yang singkat yang terjadi di tahun 1975 sampai 1976. Periode ini melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya dan perkembangan kebijakan maritim kurang signifikan. Pada periode ini, Xiangyanghong 05 melakukan empat survei misi dimulai pada tahun 1976 untuk memeriksa kondisi hidrometeorologi di daerah pendaratan yang direncanakan dari roket transportasi (secara efektif rudal balistik jarak jauh) bahwa uji coba diluncurkan untuk pertama kalinya ke Pasifik Selatan pada tahun 1980. Ini merupakan indikasi dari hubungan erat antara SOA dan pengembangan strategi militer RRT.

Selain itu, dua skuadron survei geologi kelautan dari departemen geologi (sekarang Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya), salah satu yang berbasis di Tianjin (dan kemudian di Shanghai) dan yang lainnya di Zhanjiang, melakukan survei geofisika untuk minyak, (dahulu menggunakan kapal termasuk kapal survei Kantan 1) di Laut Bohai, Laut Kuning, dan Laut China Timur Laut, dan yang terakhir di Laut China Selatan, terutama di perairan lepas pantai Delta Sungai Pearl.

2.6 Periode Pemerintahan Deng Xiaoping

Deng Xiaoping pada akhir 1977 telah meningkatkan kekuasaannya dan beralih pada kebijakan reformasi dan membuka diri. Pada masa pemerintahannya, Deng Xiaoping meletakkan dasar untuk membangun kehadiran maritim yang berfokus pada pembangunan ekonomi. Faktor utama kemungkinan RRT untuk mengalihkan perhatiannya ke arah perairan timur dan selatan adalah penghapusan beban yang telah

dikenakan oleh konfrontasi darat dengan Uni Soviet di Utara dan Barat (Huaqing, 2004:432).

Periode ini membawa pembentukan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS, menyimpulkan pada tahun 1982, diratifikasi oleh RRT pada tahun 1996), yang memperkenalkan sistem hak untuk zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Perairan di bawah yurisdiksi RRT tumbuh dari 370.000 km² menjadi 3 juta km², setara dengan hampir sepertiga dari luas daratan negara RRT, yaitu sebesar 9,7 juta km².

Perkembangan penting selama periode ini adalah peluncuran upaya untuk mengembangkan ladang minyak dan gas lepas pantai, awalnya sebagai sumber berharga valuta asing dan kemudian sebagai sumber energi untuk keperluan rumah tangga. Pada tahun 1980, dimulai dengan eksplorasi sumur minyak di Laut Bohai sebagai usaha antara RRT dan Jepang National Oil Corporation (sekarang JOGMEC atau Japan Oil, Gas, and Metals National Corporation). Pada tahun 1982, Dewan Negara mengeluarkan peraturan yaitu mengizinkan pengenalan modal asing untuk pengembangan sumber daya energi lepas pantai. Dalam hal ini, RRT beralih ke sumber-sumber asing untuk *technological know-how and capital*. Pemerintah juga mendirikan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) yang berfungsi sebagai titik kontak dan mitra untuk usaha yang melibatkan pihak asing. CNOOC juga melakukan operasi hilir seperti penyulingan dan ritel, dan sekarang telah berkembang menjadi salah satu dari tiga perusahaan minyak besar di RRT. Pada tahun 1988, Departemen pemerintah Industri Minyak dihapuskan. Hal ini merupakan perubahan yang melampaui prinsip sebelumnya yaitu memisahkan perusahaan dari aparat kontrol negara.

Pada tahun 1982, terjadi situasi kritis yang kemudian mengarah pada penerapan UU Perlindungan Lingkungan Laut. SOA bertanggung jawab untuk mensurvei dan memantau lingkungan laut dan untuk penelitian ilmiah serta bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan untuk pengembangan minyak lepas pantai dan pembuangan

limbah. Kapal inspeksi dan departemen regulasi pelabuhan bertanggung jawab untuk pengawasan, survei, dan pemantauan pencemaran laut yang berkaitan dengan kapal dan operasi pelabuhan komersial (yang sejak itu telah bergabung ke dalam Administrasi Keselamatan Maritim, Kementerian Transportasi), sementara kapal penangkap ikan dan nelayan port ditugaskan untuk penegakan hukum perikanan dan departemen regulasi pelabuhan perikanan (sekarang Biro Perikanan, Departemen Pertanian). Pada tahun 1983, undang-undang baru diumumkan, kapal patroli dan pesawat SOA bertanda “*China Marine Surveillance*” melakukan patroli pertama mereka dari Qingdao, Shanghai, dan Guangzhou dengan misi untuk perlindungan lingkungan.

SOA menerbitkan laporan tahunan tentang keadaan lingkungan laut dan bencana kelautan. Kedua laporan membedakan antara bencana alam karena penyebab seperti angin kencang, gelombang tinggi yang tidak normal, dan gunung es dan bencana lingkungan lainnya seperti alga berbahaya merah dan hijau mekar, tumpahan minyak besar, dan kerusakan garam dari air laut. SOA telah menekankan perlunya tindakan untuk mencegah atau mengurangi bencana dari jenis yang terakhir.

2.7 Periode Pemerintahan Li Xiannian

Li Xiannian merupakan Presiden RRT yang menjabat pada tahun 1983 sampai dengan 1988. Perkembangan pada periode ini pada dasarnya melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya. Pada kepemimpinan Li Xiannian, fasilitas penanganan kargo dari pelabuhan utama negara itu diperbarui, terutama untuk menangani angkutan kontainer, jalan raya, kereta api, dan jaringan transportasi berbasis sungai antara mereka dan mencapai interior pedalaman mereka ditingkatkan. Otoritas pelabuhan dan organ inspeksi kapal didirikan, dan 25 pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan luar negeri pada tahun 1983. Kapal Pengawasan Laut RRT pertama berangkat patroli pada tahun 1983 untuk perlindungan lingkungan.

Pada periode ini kerangka hukum perikanan mengalami peningkatan. Hukum perikanan disetujui pada pertemuan ke-14 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional keenam pada 20 Januari 1986. Fokus utama dari kerangka hukum tersebut adalah untuk mencegah penipisan sumber daya. Sebuah sistem izin penangkapan ikan diperkenalkan, bersama dengan penerbitan sertifikat untuk kapal penangkap ikan dan awak mereka, pemberian izin untuk budidaya, pembentukan daerah tertutup untuk memancing dan tidak ada nelayan musim, penerapan aturan tentang ukuran jaring jerat dan persentase ikan muda yang ditangkap dan ketentuan lainnya untuk mengurangi tingkat tangkapan, bersama dengan pengenalan larangan eksplisit pada penggunaan dinamit, racun, sengatan listrik, dan metode penangkapan ikan lain yang dapat menyapu seluruh sumber daya dalam satu kali tangkap.

RRT telah memiliki lima badan administratif yang terlibat dalam patroli untuk penegakan hukum maritim, yaitu Pengawasan Kelautan RRT SOA yang mana difungsikan pada pengamanan hak dan kepentingan maritim, pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan kawasan laut, dan pelestarian lingkungan laut; Biro Perikanan Kementerian Pertanian yang berfungsi sebagai manajemen penegakan hukum perikanan; Kementerian Transportasi Administrasi Keselamatan Maritim yang berfungsi sebagai regulasi keselamatan maritim dan pencegahan polusi dari kapal; Kementerian Keamanan Publik Penjaga Pantai RRT yang berfungsi untuk keselamatan publik maritim; dan Biro Anti-penyelundupan Administrasi Umum Bea Cukai yang berfungsi untuk deteksi penyelundupan maritim. Badan-badan pemerintahan RRT tersebut yang menjadi konfrontasi dengan negara-negara lain atas hak-hak dan kepentingan maritim.

2.8 Periode Pemerintahan Yang Shangkung

Yang Shangkung merupakan presiden RRT yang memimpin pada tahun 1988 sampai dengan 1993. Pada periode ini, RRT mengadopsi Undang-Undang tentang Laut Teritorial dan Zona Bersebelahan pada tahun 1992. Pada pasal 1 Undang-

Undang tersebut menyatakan bahwa Undang-undang ini diberlakukan RRT untuk melaksanakan kedaulatannya atas laut teritorial dan kontrol atas zona tambahan, dan untuk menjaga keamanan nasional dan hak dan kepentingan maritim. Ini merupakan undang-undang pertama RRT yang secara eksplisit disebutkan dengan konsep “hak maritim dan kepentingan maritim” yang diambil memiliki tiga aspek kunci, yaitu kepentingan politik, kepentingan ekonomi, dan kepentingan keamanan (Lindong. 2007).

Penerapan Hukum Laut Teritorial memberikan peraturan domestik untuk melengkapi UNCLOS, namun pada Pasal 2 meliputi ketentuan wilayah tanah RRT termasuk daratan RRT dan pulau-pulau pesisir tersebut; Taiwan dan semua pulau-pulau pesisirnya dalamnya termasuk Kepulauan Diaoyu; Kepulauan Penghu; Kepulauan Dongsha; Kepulauan Xisha; Kepulauan Zhongsha dan Kepulauan Nansha; serta semua pulau-pulau lain milik RRT. Dalam hal ini, RRT secara eksplisit menyatakan kedaulatannya atas Kepulauan Senkaku Jepang dan semua pulau di Laut China Selatan yang kepemilikannya masih diperdebatkan antara RRT dan negara-negara lain.

2.9 Periode Pemerintahan Jiang Zemin

Jiang Zemin merupakan presiden RRT yang memimpin RRT selama 2 periode yaitu tahun 1993 sampai dengan 1998 dan tahun 1998 sampai dengan 2003. Pada periode ini, program reformasi ekonomi satu partai dari Partai Komunis disebut “sosialisme dengan karakteristik RRT”. Sebagai contoh, industri perkapalan yang merupakan bagian dari sektor maritim dalam arti luas melalui serangkaian perubahan, menjadi Otoritas Industri Galangan Kapal, kemudian Industri Kesembilan Biro Manajemen, dan kemudian Kementerian Keenam dari Pembangunan Mesin, tetapi sejak tahun 1982 di tata kembali menjadi perusahaan milik negara, yaitu Perusahaan Industri Kapal RRT atau *the China Shipbuilding Industry Corporation (CSSC)*. *The Jiangnan Shipyard* (Shanghai) dan galangan kapal lainnya juga berubah menjadi

perusahaan. Guna memperkuat kerja persaingan, pada tahun 1999, CSSC itu dibagi menjadi dua badan milik negara, satu untuk menangani operasi di tempat-tempat seperti Shanghai dan Guangzhou serta yang lainnya untuk menangani operasi di tempat-tempat seperti Dalian dan Wuhan; yang pertama mempertahankan nama CSSC dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir bernama Kapal China Industry Corporation (CSIC).

Pada periode ini, RRT berubah dari negara miskin sumber daya menjadi pengeksport minyak, namun pertumbuhan ekonomi menyebabkan munculnya kekurangan energi, dan pada tahun 1993 menjadi negara pengimpor minyak. Masyarakat RRT melakukan tindakan ke luar negeri untuk membeli ladang minyak di tempat-tempat seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan, dan mereka juga fokus pada pengamanan hak atas sumber daya energi di dalam air di bawah yurisdiksi RRT. Tanpa prospek untuk peningkatan substansial dalam produksi dari ladang minyak darat, RRT memperpanjang perkembangan ladang minyak dan gas lepas pantai di China Timur dan Laut China Selatan.

Pada periode ini undang-undang kelautan RRT yaitu mengadopsi Undang-Undang tentang Administrasi Laut Daerah dan UU Perlindungan Pulau. Berfokus pada gerakan yang bertujuan untuk mempromosikan perubahan dan penyesuaian dalam struktur industri sesuai dengan tujuan kebijakan melalui sarana hukum dengan membangun sistem untuk penggunaan dan manajemen yang teratur. Namun, pada saat yang sama, RRT menyebabkan ekspansi dari kepentingan badan yang terlibat.

UU Administrasi Penggunaan Laut Daerah mulai berlaku pada tahun 2002 setelah periode pelaksanaan tentatif oleh SOA dan Departemen Keuangan. Hal ini menyediakan kepemilikan negara atas laut (permukaan, tubuh, dan dasar laut perairan interior dan laut teritorial), dengan hak-hak kepemilikan yang dilakukan oleh Dewan Negara dan Dewan Negara departemen administrasi maritim (SOA) mengawasi dan mengelola penggunaannya. Organisasi ini menerbitkan sertifikat hak untuk menggunakan wilayah perairan, sebagai imbalannya yang mengumpulkan biaya.

Peraturan yang mengatur pelaksanaan hukum, namun disediakan bahwa sertifikat tersebut dapat “dipasarkan”, yang berarti bahwa mereka dapat disiapkan untuk lelang dan bahwa mereka dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman. Dalam hal ini, sistem hukum yang berbeda yang diadopsi oleh RRT di bawah rezim sosialis.

SOA menentukan pembagian fungsional wilayah laut, yang mana akan dijadwalkan untuk pengembangan, perlindungan administratif, perlindungan alam, tujuan khusus, atau pegangan (*National Functional Divisions of the Seas*, 2011–2020). Undang-undang menetapkan periode maksimum di mana penggunaan wilayah laut dapat diatur, yaitu: 15 tahun untuk pembibitan air, 20 tahun untuk galangan kapal, 25 tahun untuk pariwisata dan hiburan, 30 tahun untuk produksi garam dan eksploitasi mineral, 40 tahun untuk kepentingan publik, dan 50 tahun untuk proyek-proyek konstruksi termasuk pelabuhan dan pabrik galangan kapal.

Sementara itu, di Laut China Selatan terdapat tumpang tindih sebagian atau seluruh klaim kepemilikan pulau dan yurisdiksi atas perairan antara tujuh partai: RRT, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Setelah Pertempuran Kepulauan Parcel antara RRT dan Vietnam Selatan pada tahun 1974, RRT didirikan kendali efektif atas semua Parcel. Pada tahun 1988 RRT bertempur dengan Vietnam di Kepulauan Spratly (Johnson South Reef Skirmish) setelah memenangkan komisi dari *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) untuk membangun sebuah pos pengamatan di Spratly dan mulai membangunnya di *Fiery Lintas Reef*. Setelah pertempuran ini, RRT mengamankan enam terumbu karang di Spratly untuk pertama kalinya dan ditempatkan sebuah garnisun permanen. Pada tahun 1995, RRT diperpanjang kontrol yang efektif mereka atas Mischief Reef (disebut Meiji Reef oleh RRT), yang juga diklaim oleh Filipina, membangun apa yang digambarkan sebagai tempat penampungan bagi nelayan dan personil penempatan dari Biro Administrasi Perikanan untuk Laut China Selatan.

RRT meratifikasi UNCLOS pada tahun 1996 dan mengeluarkan deklarasi pemerintah yang mengatur *baseline* untuk pantai daratan dan untuk Paracel. Namun tidak termasuk sisi utara Semenanjung Shandong menghadapi Utara dan Korea Selatan di Laut Kuning Utara, Taiwan dan Senkaku Islands Jepang di Laut China Timur, dan Macclesfield Bank dan Kepulauan Spratly di Selatan Laut China dari deklarasi, meninggalkan ini akan diumumkan pada titik masa depan yang tepat. Sehubungan dengan Laut China Timur, setelah pemerintah Jepang (kemudian dipimpin oleh Perdana Menteri Noda Yoshihiko) mengumumkan niatnya untuk "nasionalisasi" the Senkakus, pemerintah China mengeluarkan deklarasi mengenai *baseline* laut dan pulau-pulau Diaoyu afiliasinya.

Pada tahun 1998 RRT mengadopsi UU Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Undang-undang ini juga menimbulkan sejumlah masalah. Pertama, Pasal 2 UU ini menyatakan bahwa RRT menetapkan batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen sehubungan dengan klaim yang tumpang tindih dengan perjanjian dengan negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan sesuai dengan prinsip adil atas dasar hukum internasional. Namun dalam pembicaraan antara Jepang dan RRT mengenai batas antara ZEE mereka, pihak RRT mendorong untuk memperluas garis tengah geografis ke palung Okinawa berdasarkan perpanjangan alami dari landas kontinen. Sehubungan dengan garis tengah geografis, RRT menegaskan bahwa pihak kontinental garis pantai terus menerus melebar tetapi garis pantai Jepang terdiri dari pulau-pulau yang tidak berkelanjutan, dan bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip adil untuk menggambarkan zona berdasarkan kondisi geografis yang tidak setara ini. Pemerintah RRT mengajukan permohonan kepada Komisi Batas Landas Kontinen pada bulan Desember 2012, untuk pengakuannya bahwa landas kontinennya memanjang sejauh palung Okinawa.

Kedua, Pasal 14 menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang ini tidak akan mempengaruhi hak historis yang dinikmati oleh RRT, secara eksplisit menyatakan bahwa penentuan ZEE dan landas kontinen tidak berarti mengabaikan

hak sejarah RRT di wilayah laut sekitarnya. Dalam hal ini, RRT mengambil sikap untuk menerapkan hak historisnya secara berurutan untuk mengamankan hak-hak dan kepentingannya. Hal yang mendasari klaim bahwa RRT telah membuat garis sembilan putus-putus di sekitar area yang luas memanjang Laut China Selatan.

Ketiga, Pasal 58 ayat 3 UNCLOS yang menyatakan menjalankan hak-hak dari navigasi dan melalui ZEE dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari Negara pantai. UNCLOS tidak mendefinisikan arti dari “memperhatikan” dalam konteks ini, tetapi RRT telah mengambil sikap mencoba untuk membatasi kegiatan intelijen, pengawasan, dan pengintaian militer AS, melakukan kegiatan sebagai sebuah negara dengan penekanan pada hak pertahanannya sendiri.

Contoh umumnya adalah pada April 2000 terjadi tabrakan antara J-8 jet tempur angkatan laut RRT dan EP-3 angkatan laut AS pesawat pengintai elektronik angkatan laut AS di langit dekat Pulau Hainan dan pada Maret 2009 pelecehan kapal pengintai AS angkatan laut di lepas pantai Hainan oleh sejumlah kapal resmi dan kapal nelayan. Insiden ini mengungkap kecanggihan RRT dalam menjaga militer AS keluar dari ZEE-nya. Angkatan Laut, Korps Marinir, dan Penjaga Pantai Amerika Serikat telah merespon dari sudut pandang yang menekankan kebebasan navigasi, jelas menyatakan posisinya bahwa survei jalur laut dan penyelidikan militer tidak bersifat ilmiah yang di bawah UNCLOS memerlukan persetujuan dari negara pesisir pantai dalam bentuk persetujuan terlebih dahulu melalui saluran diplomatik.

Sementara itu, skuadron patroli Komando Penegakan Hukum Perikanan, yang telah ditugaskan kepada Biro Administrasi Perikanan untuk Laut Kuning dan Laut Bohai (Yantai, Provinsi Shandong), Biro Administrasi Perikanan untuk Laut China Timur (Shanghai), dan Biro Administrasi Perikanan untuk Laut China Selatan (Guangzhou), diberi nama Komando Penegakan Hukum Perikanan untuk biro masing-masing pada tahun 1995.

Pada periode ini, penegakan Hukum Perikanan didirikan pada tahun 2000. Selain itu juga terdapat organisasi di tingkat pemerintah daerah. Sampai dengan akhir

tahun 2010 ada terdapat 1.421 unit kapal patroli penegakan hukum nasional, meskipun hanya delapan unit dari lebih dari 1.000 ton (Jiang. 2012:20-22).

Perkembangan kebijakan maritim pada periode ini menyebut pentingnya laut untuk pertama kalinya secara resmi diangkat pada Kongres Nasional Partai Komunis RRT, yang berdiri di puncak kepemimpinan politik RRT dan berada di Kongres ke-15 yang diadakan pada tahun 1997 pada masa pemerintahan Jiang Zemin. Laporan Sekjen untuk kongres mencatat bahwa laut merupakan elemen penting dari wilayah nasional dan sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kongres ke-16 yang diselenggarakan pada tahun 2002, setelah Hu Jintao mengambil kepemimpinan mengakui bahwa dibutuhkannya badan strategis untuk melaksanakan pengembangan maritim. Pengakuan tersebut oleh Dewan Negara di wujudkan dalam Garis Besar Pedoman Pengembangan Ekonomi Kelautan Nasional yang diterapkan pada tahun berikutnya dan menyatakan bahwa RRT akan membangun dirinya menjadi sebuah kekuatan maritim secara bertahap.

2.10 Periode Pemerintahan Hu Jintao

Hu Jintao merupakan presiden RRT yang memimpin selama 2 periode yaitu tahun 2003 sampai dengan 2008 dan tahun 2008 sampai dengan 2013. Periode ini pada dasarnya melanjutkan kebijakan maritim dari kepemimpinan sebelumnya. Pada tahun 2005 RRT bergabung dengan Filipina dan Vietnam dalam peluncuran program eksplorasi minyak trilateral di Laut China Selatan. Hal ini sesuai dengan warisan Deng Xiaoping menyerukan perselisihan yang akan disimpan dan pengembangan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun, Filipina mengundurkan diri dari program ini setelah lebih dari satu tahun, karena ketidakpuasan dengan kegiatan yang dilakukan terutama di perairan di bawah yurisdiksinya. Pada tahun 2008 Jepang dan RRT mencapai kesepakatan politik tentang pengembangan bersama dari beberapa ladang gas di Laut China Timur, namun hubungan kedua negara kemudian dingin tanpa kemajuan yang telah dibuat dalam pembicaraan tentang permasalahan tersebut.

Pada tahun 2011, RRT menyelesaikan pembangunan dalam negeri Haiyang Shiyou (Oceanic Petroleum) 30.670 ton, yang mampu melakukan pengeboran pada kedalaman 3.000 meter, dan tahun berikutnya itu dipasang di Laut China Selatan ke selatan Hong Kong.

Jepang dan RRT telah gagal untuk melakukan demarkasi batas antara zona ekonomi eksklusif mereka di Timur Laut RRT, sehingga RRT memulai pengembangan skala penuh dari lapangan gas Pinghu pada tahun 1999 dan dari ladang gas Chunxiao dan Longjing (disebut Shirakaba dan Asunaro oleh Jepang) pada tahun 2004; yang kemudian menjadi sumber masalah diplomatik antara kedua negara. Kegiatan pengembangan RRT terbatas pada perairan terdekat dari Pearl River Delta dan di Teluk Beibu (Teluk Tonkin) di Laut China Selatan, tetapi RRT keberatan dengan kegiatan pengembangan sumber daya Vietnam dan Filipina yang mana telah mengambil inisiatif kegiatan pembangunan perairan dalam dan menganggap RRT berada di bawah yurisdiksinya. Hal tersebut menjadikan munculnya sentimen nasionalis yang melibatkan konfrontasi dengan kedua negara tersebut.

Pada periode ini, Revisi UU Perikanan pada tahun 2004 diperkenalkan sistem jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat perikanan. Meski begitu, sebagai bangsa telah berfokus proaktif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara ketentuan hukum nyata dan perilaku aktual telah banyak dilaporkan di bidang perlindungan lingkungan dan pelestarian sumber daya. Pemerintah pusat berupaya untuk menghentikan pencemaran laut dan penipisan sumber daya; pemimpin lokal dan nelayan yang terus berusaha untuk meningkatkan isi dan nilai produksi; serta armada penangkap ikan RRT telah memasuki perairan negara lain dan menyebabkan meningkatnya masalah.

UU Perlindungan Pulau mulai berlaku pada tahun 2010 (*Island Protection Law of the People's Republic of China*, 2009). Hal ini memberikan perlindungan pulau-

pulau dengan tujuan khusus (seperti teritorial dasar laut, yang melayani tujuan pertahanan nasional, dan di dalam cagar alam laut). Pulau-pulau tak berpenghuni milik negara dan di bawah pemikiran yang sama seperti dalam kasus UU Administrasi Penggunaan Wilayah Laut, pengguna dikenakan biaya. Di perairan di mana RRT mengklaim yurisdiksi, ada lebih dari 6.900 pulau dengan luas minimal 500 meter persegi; 433 dari mereka yang dihuni, dan sisanya tidak berpenghuni, serta ada lebih dari 10.000 pulau-pulau kecil. Pengembangan pulau tak berpenghuni semakin maju sehubungan dengan pengembangan ekonomi, dan ada laporan pembangunan merajalela semakin serius, seperti kerusakan ekosistem melalui penggalian dan penebangan, penurunan jumlah pulau karena penggunaan bahan peledak dan menghubungkan pulau-pulau ke daratan, dan pendudukan tidak resmi untuk pariwisata.

Dalam hal ini, SOA adalah organ pemerintah yang bertanggung jawab untuk kebijakan laut RRT, tetapi dalam praktiknya banyak organ lain juga terlibat dalam bidang ini (lihat tabel 2.2). PLA juga telah memperkuat pernyataannya sampai batas tertentu melalui undang-undang dan di bawah sistem khas pemerintahan RRT, berbagai organisasi di bawah Komite Pusat Partai Komunis memimpin dalam pengaturan arah kebijakan

Sebuah langkah yang lebih berkaitan dengan penguatan klaim kedaulatan daripada manajemen pulau, Maret 2012 SOA dan Kementerian Urusan Sipil bertindak berdasarkan UU Perlindungan Pulau untuk memberitakan nama resmi RRT untuk pulau Diaoyu dan pulau-pulau di sekitarnya. Selanjutnya, pada bulan September di tahun yang sama pemerintah mengumumkan koordinat geografis dan fitur geografis pulau-pulau, seperti gunung dan sungai.

Tabel 2.2 Badan Administrasi dalam Kebijakan Kelautan dan Fungsinya (Sumber: *China's Ocean Development Report. 2012, 309–17*)

Organisasi	Fungsi Utama
Departemen Luar Negeri	Kebijakan batas laut, arah dan koordinasi urusan eksternal kelautan, negosiasi diplomatik tentang batas demarkasi dan pengembangan bersama
Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya (1) Survei Geologi Tiongkok (2) Badan Pemetaan Nasional	Perlindungan dan penggunaan sumber daya alam laut yang rasional (1) Eksekusi, manajemen, dan kompilasi survei geologi kelautan (2) Manajemen survei kelautan
Administrasi Kelautan Negara (SOA), instansi tingkat wakil menteri dari Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya	Manajemen penggunaan wilayah laut, perlindungan dari lingkungan kelautan, ilmu kelautan dan teknologi, kerjasama kelautan internasional, pencegahan/mitigasi bencana laut, pengamanan hak dan kepentingan maritim negara, pemantauan ekonomi kelautan, konservasi energi maritim, pengelolaan penggunaan pulau tak berpenghuni, penggunaan air laut, patroli air berkala di bawah yurisdiksi Tiongkok untuk perlindungan hak dan penegakan hukumnya
Kementerian Perlindungan Lingkungan Hidup	Arahan, koordinasi, dan pengawasan perlindungan lingkungan laut, tindakan terhadap polusi laut dari sumber pedalaman dan konstruksi pantai
Kementerian Sains dan Teknologi	Manajemen ilmu kelautan dan teknologi; dan Pengembangan promosi
Menteri Transportasi (1) Administrasi Keselamatan Maritim (2) Pusat Pencarian dan penyelamatan Maritim Tiongkok (3) <i>Rescue and Salvage</i> Tiongkok	Pengawasan transportasi laut, manajemen pelabuhan (1) Peraturan keselamatan maritim, pencegahan polusi dari kapal, inspeksi kapal dan fasilitas, pengawasan dan manajemen keamanan navigasi (2) Koordinasi kegiatan penyelamatan secara nasional (3) Penyelamatan, pemadam kebakaran maritim, pencegahan tumpahan minyak
Kementrian Pertanian (1) Biro Perikanan	Pengembangan ekonomi perikanan laut (1) Manajemen industri perikanan, perikanan penegakan hukum, pengawasan pelabuhan dan inspeksi kapal penangkap ikan
Departemen Perindustrian dan	Regulasi dan produksi pengelolaan garam laut, penimbunan garam

Teknologi Informasi	
Menteri Pendidikan	Koordinasi kerja sama dengan UNESCO
Administrasi Kehutanan Negara	Pengelolaan konservasi lahan basah dan hutan bakau
Administrasi Energi Nasional	Manajemen industri minyak dan gas lepas pantai dan pembangkit tenaga listrik (termasuk energi nuklir dan sumber energi terbarukan)
Administrasi Wisata Nasional Tiongkok	Manajemen industri jelajah laut
Administrasi Negara dari Warisan budaya	Konservasi dan pengelolaan warisan budaya di dalam air, pemeriksaan kapal selam penggalian
Administrasi Umum PT Bea cukai (1) Biro Anti Penyelundupan	Bea cukai (1) Kontrol dan deteksi maritim penyelundupan
Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (1) Jaminan Navigasi Departemen, Angkatan Laut	Perlindungan dan kedaulatan keamanan maritim, pengamanan hak dan minat maritim
Markas besar	(1) Survei saluran air, publikasi grafik maritim untuk penggunaan sipil

RRT dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN menandatangani Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan pada tahun 2002 dengan upaya untuk mengurangi ketegangan di antara mereka di perairan ini. Namun, kedua belah pihak telah gagal membuat kemajuan substantif terhadap mengangkat status dokumen ini ke kode yang mengikat secara hukum etik. Beberapa rinciannya tertutup, namun dalam beberapa tahun terakhir RRT telah diambil untuk mengacu pada klaim mereka di China Timur dan Laut China Selatan sebagai inti dari kepentingan RRT. Sementara itu, Vietnam mengadopsi hukum maritim yang mendefinisikan wilayahnya sendiri sebagai termasuk Paracel, Spratly, dan Macclesfield Bank secara keseluruhan pada tahun 2012. RRT membantah hal ini dengan membentuk pemerintah daerah untuk tiga kelompok pulau-pulau di bawah kota Sansha, berlokasi di pulau Yongxing (pulau Woody) di Paracel, dan dengan mendirikan sebuah distrik keamanan militer untuk kota ini.

Namun peluncuran kapal tersebut sebagai sebuah badan di dalam SOA tidak berfungsi sebagai kapal patroli sampai tahun 1998. Selanjutnya, kapal tersebut berfungsi sebagai perlindungan hak dan kepentingan maritim RRT. Pada tahun 2008 sebuah ketentuan ditambahkan untuk menetapkan bahwa Kapal Pengawasan Laut RRT untuk melakukan patroli secara berkala guna melindungi hak-hak dan penegakan hukum RRT, yang berarti pelaksanaan kegiatan patroli di wilayah laut di yuridiksi klaim RRT.

Kapal Pengawasan Laut RRT memiliki tiga armada sesuai dengan Laut Utara, Laut Timur, dan Laut Selatan, yang mana masing-masing termasuk tiga atau empat armada dan satu detasemen udara. Pasukan terbaru adalah armada 10 Armada Kapal Laut Selatan, yang ditempatkan di Pulau Yongxing di Paracel pada bulan Maret 2013. Unit pengawasan laut juga telah didirikan dalam urusan bagian maritim pemerintah daerah provinsi atau lainnya, seperti di Provinsi Fujian. Menurut laporan dalam jurnal khusus, jumlah kapal pengawas sebanyak 62 unit, dimana 26 unit memiliki kemampuan berlayar di laut yang cukup untuk digunakan dalam perlindungan hak-hak dan kepentingan di laut lepas (Zhiming. 2012:20-22). Patroli memiliki nama kode, seperti Haidun untuk pemanfaatan wilayah laut, Hudao untuk pertahanan pulau, dan Bihai untuk pelestarian lingkungan laut. Penambahan kapal besar dan canggih yang membawa helikopter, seperti Haijian 83 (3.980 ton) dan Yuzheng (310 2,580 ton) dengan armada dari Kapal Pengawasan Laut dan Komando Penegakan Hukum Perikanan dimulai pada tahun 2005, ketika kekuatan ekonomi RRT telah tumbuh. Penggunaan armada dari kapal administrasi daripada armada dari kapal angkatan laut di garis depan dapat dilihat sebagai respon terkendali dalam hal menghindari eskalasi ketegangan. Tetapi telah dicatat bahwa sebagai peralatan baru telah ditambahkan, ada juga terjadi peningkatan aktivitas tegas RRT.

Adanya dua insiden pada tahun 2011 di Laut China Selatan ketika Kapal Pengawasan Laut dan lain-lain memotong kabel yang diletakkan oleh kapal mengeksplorasi ladang minyak dan gas di dalam ZEE yang diklaim oleh Vietnam.

Pada tahun 2012 ada berkepanjangan dari waktu yang lama antara RRT dan Filipina di dekat Scarborough Shoal atau Pulau Huangyan di Macclesfield Bank, di mana sebuah kapal Filipina yang segera digantikan oleh kapal patroli penjaga pantai berusaha untuk menghentikan dugaan perburuan oleh armada kapal penangkap ikan RRT dihadapkan kapal dari Kapal Pengawasan Laut RRT dan Komando Penegakan Hukum Perikanan, yang sedang mencari setelah kapal nelayan sejalan dengan klaim RRT untuk kawasan tersebut. Filipina menyerukan hal yang akan disampaikan kepada Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut, namun RRT menolak; sebaliknya mereka menerapkan tekanan ekonomi di Filipina, termasuk pengenaan embargo pada impor pisang dan penghentian kelompok wisata.

Sejak September 2012 telah menjadi lebih atau kurang setiap hari untuk kapal dari Kapal Pengawasan Laut RRT dan Komando Penegakan Hukum Perikanan untuk berlayar di perairan teritorial dan zona tambahan sekitar Kepulauan Senkaku Jepang. Kapal Pengawasan Laut RRT juga telah melanggar wilayah udara di Kepulauan Senkaku Jepang tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam media RRT, sekitar waktu yang sama ini serangan berulang mulai terjadi, 12 usang kapal Angkatan Laut PLA dikonversi menjadi kapal patroli. Ini termasuk kapal-kapal besar seperti Haijian 111 (4420 ton), yang merupakan kapal pemecah es di Laut Armada Utara, dan Yuzheng 206 (5872 ton), yang merupakan kapal survei di Laut Armada Timur.

SOA dari latar belakang berdirinya selalu memiliki hubungan dekat dengan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat dan pada tahun 2009 keduanya menandatangani perjanjian baru tentang kerja sama. Pertemuan tahunan yang diselenggarakan antara ketua mereka setiap musim semi dan kerjasama diperkuat dalam enam bidang, termasuk strategi dan kebijakan, menjaga hak-hak dan kepentingan, survei kelautan, pengamatan kutub dan kelautan, rear-daerah resupplying dan pencegahan bencana dan mitigasi, dan publisitas untuk mempromosikan budaya maritim dan kesadaran laut.

Pada pembukaan kongres ke-18 yang diselenggarakan tahun 2012, tercatat bahwa membangun RRT menjadi kekuatan maritim telah dijadikan sebagai tujuan strategis. Dalam hal ini, istilah “kekuatan maritim” inilah yang pertama kalinya ditetapkan oleh pemerintah RRT dalam dokumen resmi Negara.

Pada periode ini, fondasi kebijakan maritim RRT ditentukan berdasarkan pedoman lima tahun yang disusun sesuai dengan program strategis yang ditetapkan oleh BPK dan secara resmi disetujui oleh Kongres Rakyat Nasional. Pedoman ke-11 lima tahun untuk tahun 2006 sampai dengan 2010, memiliki satu bagian tentang laut, kemudian pada pedoman ke-12 untuk tahun 2011 sampai dengan 2015, memiliki 1 bab yang bersubyek mempromosikan pembangunan ekonomi kelautan. Penyusunan pedoman yang lebih rinci oleh berbagai badan-badan pemerintah, termasuk pedoman lima tahun untuk operasi maritim, untuk pembangunan ekonomi kelautan, dan untuk pengembangan ilmu dan teknologi kelautan dan disetujui oleh Dewan negara.

Bab 14 dari pedoman ke-12 lima tahun dimulai dengan mengembangkan dan menerapkan strategi pembangunan kelautan berdasarkan perencanaan terpadu laut dan darat, dan meningkatkan pengembangan dan kemampuan kontrol kelautan. Bagian 1 dari pedoman tersebut berisikan pedoman mengoptimalkan struktur industri kelautan, termasuk bagian mengembangkan minyak kelautan dan gas, transportasi laut, perikanan laut, industri wisata pantai dan memperluas biofarmasi kelautan, pemanfaatan air laut yang terintegrasi, manufaktur peralatan teknik kelautan dan industri lainnya.

Bagian 2 dari pedoman tersebut berisikan mengenai pedoman memperkuat manajemen kelautan yang terintegrasi, dengan ayat-ayat memperkuat wilayah laut dan manajemen pulau meningkatkan mekanisme pasar untuk hak penggunaan wilayah laut; membuat perencanaan perlindungan lingkungan laut terpadu, memperkuat perlindungan dan pemulihan ekosistem laut; meningkatkan sistem bantuan bencana laut, dan memperkuat kemampuan penanganan kelautan darurat. Memperkuat survei dan pemetaan kelautan terpadu, dan melaksanakan penyelidikan

kutub ilmiah dan kelautan secara aktif; menjamin keamanan transportasi laut dan mempertahankan hak dan kepentingan negara.

Bagian pertama berisikan penggunaan energi terbarukan dari laut. Hukum Energi terbarukan Republik Rakyat Tiongkok mulai berlaku pada tahun 2006 (Renewable Energy Law of the People's Republic of China). Pada tahun 2010 Administrasi Energi Nasional dan Administrasi Kelautan Negara ditetapkan dengan undang-undang fasilitasi sementara pada pengelolaan pembangunan peternakan angin maritim. Pada tahun yang sama awal dimulainya operasi skala besar peternakan angin 3 megawatt di perairan Shanghai. Di tempat pengujian juga telah mulai untuk pembangkit listrik menggunakan perbedaan pasang tingkat, gelombang dan arus pasang surut. Cara kerja pada pembangkit listrik menggunakan perbedaan suhu dan salinitas telah dilakukan pada tahap percobaan.

RRT telah membangun pabrik desalinisasi membran osmosis Asia terbesar di Tianjin dan juga mempromosikan ekspor tanaman tersebut. Ekstraksi bahan kimia dari air laut secara praktis juga telah diluncurkan dan penggunaan air laut untuk tujuan seperti sirkulasi pendingin pada tahap pengembangan model. Bidang kedua adalah eksplorasi sumber daya mineral dasar laut. Selain minyak dan gas, metana adalah sumber daya yang terletak paling dekat dengan prospek pengembangan praktis. Berdasarkan eksplorasi selama dekade terakhir, telah dilaporkan ketentuan bahwa deposito dari sumber daya terbesar setengah dari darat dan perairan pantai minyak dan gas cadangan di bawah perairan Laut China Selatan di tempat-tempat seperti palung Xisha, daerah sekitar kepulauan Dongsha (Pratas) dan di daerah sebelah tenggara pulau Hainan. Sejak tahun 2009 Survei Geologi Kelautan Guangzhou, Departemen Tanah dan Sumber Daya, telah beroperasi Haiyang 6, kapal survei geofisika 4.600 ton yang mengeksplorasi terutama untuk hidrat metana.

Sementara itu, pada tahun 2001 Otoritas Dasar Laut Internasional yang didirikan berdasarkan UNCLOS diberikan hak eksplorasi dasar laut yang dalam eksklusif untuk nodul mangan di zona laut terbuka dari laut pasifik ke Asosiasi

Penelitian dan Pengembangan Mineral Kelautan RRT atau China Ocean Minerals Research and Development Association (COMRA). RRT merupakan satu dari delapan negara yang menerima hak tersebut dari Otoritas Dasar Laut Internasional atau The International Seabed Authority (ISA) pada saat itu. COMRA adalah badan eksternal yang berafiliasi dengan SOA dan dipimpin oleh seorang wakil direktur SOA. Dalam hal ini, mengoperasikan Dayang 1, sebuah kapal dengan berat 4.385 ton khusus survei sumber daya. Pada tahun 2011 juga disahkan oleh ISA untuk mengeksplorasi deposito hidrotermal bawah laut di barat daya Samudera Hindia. Pada tahun 2012 dilaporkan bahwa dayang I telah diekstraksi sampel 1,2 ton dari dasar laut Pasifik Selatan pada kedalaman 3.000 meter. Kerak kobalt ditemukan dilokasi bawah laut lepas dari laut Pasifik, dan pada tahun 2012, RRT diterapkan pada ISA untuk wilayah pertambangan di wilayah tersebut.

Bidang ketiga adalah observasi kutub yang merupakan tanggung jawab SOA Administrasi Arktik dan Antartika. Pada tahun 1984, SOA dikirim misi pertama ke antartika dengan kapal survei ilmiah Xiangyangjiang 10 didampingi kapal penyelamatan PLA Angkatan Laut 12.000 ton dan kapal penyelamatan J121 Changxingdao, dan mendirikan Stasiun Changcheng di Pulau Raja George. Sejak saat itu, RRT telah menambahkan dua stasiun Antartika, Stasiun Zhongshan di pantai timur benua Antartika dan Stasiun Kunlun pada titik tertinggi dari ketinggian di benua itu. Pada tahun 1993 RRT mengakuisisi sebuah kapal pemecah es 21.000 ton dari Ukraina, yang mereka namakan Xuelong.

Di Arktik, Xuelong dilakukan lima misi pengamatan dari tahun 1999 hingga tahun 2012, dan pada tahun 2004 RRT mendirikan basis pengamatan Stasiun Huanghe di pulau Svalbard Norwegia. RRT bergerak dengan maksud untuk pembukaan jalur laut Arktik sebagai akibat dari surut tutup es di kutub dan partisipasi dalam eksploitasi sumber daya. Misi kelima membuat perjalanan ke Islandia pada musim panas tahun 2012, melewati Laut Jepang dan Selat Soya ke Laut Okhotsk, berlayar ke pulau Paramushir di Kuril utara ke Laut Bering, dan

mengambil rute pesisir melalui ZEE Rusia. Pada perjalanan kembalinya, karena mencairnya es di Kutub Utara telah berkembang lebih cepat dari yang diharapkan, Xuelong mampu mengambil rute terpendek melalui Laut Arktik pusat, melewati Kutub Utara; kapal tersebut menyimpulkan perjalanan melewati Selat Tsugaru dan Tsushima. RRT mengemukakan bahwa Rusia yang bersangkutan, baik dari segi keamanan dan hak-hak ekonomi, pada kenyataan bahwa misi melewati Laut Okhotsk itu tidak mengikuti rute pesisir melalui Arktik.

2.11 Periode Pemerintahan Xi Jinping

Xi Jinping merupakan presiden RRT yang memimpin pada tahun 2013 hingga saat ini. Transisi kepemimpinan Xi Jinping ini pada dasarnya melanjutkan kebijakan maritim pada kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Pada Januari 2013 RRT telah mengirimkan total 29 misi ke Antartika. Kelanjutan perkembangan kebijakan maritim dari periode sebelumnya, pada saat RRT melanjutkan misi ke Antartika, pemerintah RRT juga telah menyatakan bahwa di bawah perjanjian, sumber daya mineral dan energi dari Antartika tidak dapat dikembangkan sampai 2041, tetapi sebagai negara menguras sumber daya tersebut, RRT melanjutkan dengan survei dasar di bawah bendera ilmu pengetahuan dan meletakkan dasar untuk klaim masa depan wilayah dan sumber daya dalam mengejar kepentingan nasional RRT (*China's Ocean Development Report, 2012: 363*). Selama periode ke-12 pedoman lima tahun RRT mengatakan bahwa RRT akan menambah satu atau dua lebih stasiun dan menetapkan pesawat sayap tetap untuk koneksi antara stasiun dan keperluan lainnya.

Pemerintahan RRT di bawah kepemimpinan Xi Jinping berupaya menghidupkan kembali konsep “jalur sutra” dalam agenda kebijakan luar negerinya. Jalur sutra kemudian dipromosikan menjadi slogan baru RRT di berbagai forum internasional. Konsep jalur sutra merupakan konsep lama di masa lampau untuk menamakan jalur perdagangan dan budaya antara RRT dan Asia Tenggara dan Asia Selatan, serta dengan negara Eropa dan timur Tengah yang di bangun pada masa

Dinasti Han, sekitar tahun 200 SM. Dalam pandangan pimpinan Xi Jinping, konsep jalur sutra baru dikenal juga dengan nama “*One Belt, One Road*” yang terdiri dari “sabuk ekonomi jalur sutra baru” atau *new Silk Road economic belt* yang mengindikasikan hubungan ekonomi yang lebih kuat dengan Asia Tengah dengan fokus perdagangan. Kemudian, para pemimpin RRT menambah satu konsep lagi yakni “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21” atau *21st Century Maritime Silk Road* yang dipandang sebagai upaya untuk mempererat hubungan dengan Asia selatan dan Asia Tenggara yang difokuskan pada keamanan perdagangan maritim.

Pentingnya kedua slogan baru itu dapat dilihat dari fakta bahwa kedua konsep itu disebutkan dalam dokumen terbuka setelah sidang pleno ke-3 dari Komite Sentral ke-18 Partai Komunis RRT yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013 di Beijing. Dalam kurun waktu selama 18 bulan, RRT mengeluarkan rencana aksi komprehensif yang didukung hampir 60 negara Eurasia dan non Eurasia. Jaringan ekonomi yang diajukan tersebut mencakup wilayah geografis yang sangat luas. Sabuk daratan akan melalui benua Asia, Eropa, dan Afrika, menghubungkan RRT, Asia, Tengah, Rusia dan Eropa di Utara, yang menghubungkan RRT dengan Teluk Persia dan Laut Mediterania melalui Asia Tengah dan Lautan Hindia di selatan.

BAB 3. SISTEM POLITIK DAN PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

3.1 Sistem Politik Republik Rakyat Tiongkok

Sistem politik RRT memiliki unit-unit dengan berbagai fungsi dan tugas yang terperinci. Sistem politik RRT berbeda dengan sistem politik di negara lain, yang mana institusi pemerintahan yang memiliki peran besar adalah Kongres Rakyat Nasional (KRN) atau *National People's Congress* dalam setiap pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan. Kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh KRN sangat kuat sehingga keputusan KRN menjadi sesuatu ketetapan yang harus dilakukan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini adalah Dewan Negara.

Sistem Politik komunisme RRT dipengaruhi oleh beberapa hal sehingga tercipta suatu sistem politik berkarakteristik Soviet dengan penyesuaian RRT. Sistem komunis RRT memiliki karakteristik komunisme Soviet dengan tradisi politik RRT, lingkungan revisioner serta sejarah dari Partai Komunis RRT. Perkembangan politik kontemporer RRT tidak lepas dari peran para tokoh revolusioner Partai Komunis China (PKC) di masa lampau (Mas'ood dan MacAndrews. 1984:161). Mengembangkan dan menciptakan kondisi kehidupan komunis dari pemikiran Marxis-Leninis menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai para tokoh Partai Komunis RRT yang berkuasa beserta para pengikutnya.

Kongres Rakyat Nasional dilaksanakan untuk pertama kalinya pada 15 September 1954. Mao Ze Dong mengungkapkan mengenai garis dasar pemikiran hingga terciptanya partai komunis. Sehingga ketika PKC meraih kekuasaannya atas RRT pada tahun 1949 dan menetapkan sistem politik model Soviet untuk diberlakukan di RRT. Sistem politik model Soviet menjadi sistem politik dengan karakteristik komunisme yang diterapkan oleh RRT. Pada sistem politik model Soviet yang digunakan oleh RRT, seterusnya disebut sistem politik RRT, memberlakukan sistem satu partai, dengan hanya memiliki satu partai yang berkuasa dan mengisi

jabatan di pemerintahan. PKC menjadi satu-satunya partai yang berkuasa dan memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan di dalam struktur pemerintahan, departemen, maupun lembaga atau institusi-institusi pemerintahan RRT.

3.1.1 Peran dan fungsi Kongres Rakyat Nasional

Kongres Rakyat Nasional (KRN) atau *National People's Congress* merupakan suatu bentuk organisasi yang menjadi simbol kekuatan RRT dan menjadi bagian yang terpenting fundamental bagi sistem politik RRT (China.org.cn). Kongres Rakyat Nasional pertama kali dilaksanakan pada tahun 1954, hingga saat ini sudah terselenggara sebelas kali pertemuan besar yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pemilihan anggota kongres dilaksanakan pada pertemuan tersebut. Para anggota kongres yang terpilih akan mengadakan pertemuan anggota setiap satu tahun sekali selama lima tahun tersebut.

Departemen Organisasi Partai Komunis RRT atau *Organization Department of Chinese Communist Party* melakukan pemilihan anggota kongres atas individu-individu yang berasal dari partai, yang mana alokasi perolehan kursi para kandidat anggota kongres ditentukan oleh *standing committee*. Anggota partai yang terpilih berasal dari berbagai macam kalangan profesional, akademisi dan spesialis di berbagai bidang kajian ilmu. Kongres Rakyat Nasional menghasilkan dan mengesahkan berbagai macam keputusan yang menjadi suatu kebijakan yang harus dilakukan oleh badan eksekutif, dalam hal ini dilakukan oleh Dewan Negara bersama aparatur negara yang berada dalam jajaran Dewan Negara dan dibawah supervisi Dewan Negara. Kongres Rakyat Nasional melakukan aktifitas dan kinerja hanya di tiap-tiap sidang atau sesi pertemuan KRN di setiap tahun. Selain dari waktu yang ditentukan untuk melakukan sesi pertemuan, maka tugas dan fungsi KRN dibekukan untuk sementara hingga pertemuan anggota KRN di sesi berikutnya. Pada masa pasif tersebut, tugas dan fungsi KRN digantikan oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau *standing committee of The National's People's Congress*.

KRN dalam sistim politik RRT memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap kinerja badan eksekutif. Fungsi dan kewenangan dari KRN tertuang dalam konstitusi RRT, setidaknya terdapat 15 fungsi yang dipaparkan dalam konstitusi RRT Bab 3 ayat 62, yaitu sebagai berikut (npc.gov.cn):

1. Melakukan amandemen terhadap konstitusi;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstitusi;
3. Membuat dan melakukan amandemen terhadap hukum yang mengatur mengenai kriminalitas dasar, peristiwa sosial, badan negara dan permasalahan lainnya;
4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden RRT;
5. Memilih Perdana Menteri dari beberapa kandidat yang diusulkan oleh Presiden, dan memilih wakil Perdana Menteri, para Dewan Negara, Menteri-menteri yang bertanggung jawab atas kementerian dan komisi, Auditor General, dan Sekertaris Jenderal yang diusulkan dari beberapa kandidat usulan Perdana Menteri;
6. Memilih Ketua Komisi Militer Pusat dan memilih anggota-anggota dari Komisi Militer Pusat;
7. Memilih Ketua Mahkamah Rakyat Tertinggi;
8. Memilih Ketua Jaksa untuk Kejaksaan Rakyat Tertinggi
9. Melakukan evaluasi dan menyetujui pedoman Ekonomi Nasional dan Pengembangan Sosial, beserta laporan mengenai implementasinya;
10. Memeriksa dan menyetujui anggaran negara dan laporan penggunaannya;
11. Mengubah atau menghapuskan keputusan-keputusan yang dianggap tidak pantas, yang diajukan oleh Standing Committee KRN;
12. Menyetujui upaya pembangunan di tiap provinsi, daerah otonomi, dan kotamadya dibawah Pemerintah Pusat;
13. Memutuskan pembangunan wilayah administrasi khusus beserta sistim yang diberlakukan di sana;
14. Memutuskan perang dan damai; dan

15. Menyelenggarakan keseluruhan fungsi dan kewenangan sebagai badan kekuasaan Negara tertinggi.

Tugas pokok dan fungsi KRN yang telah dipaparkan tersebut dapat terlihat pada poin kesembilan dijelaskan bahwasanya KRN melakukan evaluasi dan menyetujui mengenai Pedoman Lima Tahun untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok atau *Five-Years Plans on National Economic and Social Development of People's Republic of China*, beserta evaluasi dan memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggung jawaban mengenai Pedoman jangka panjang tersebut yang diberikan oleh Dewan Negara. Dalam proses pembuatan kebijakan jangka panjang mengenai perekonomian nasional dan pengembangan sosial, para anggota yang tergabung dalam KRN memiliki peran yang besar untuk menentukan dan menyetujui arah perkembangan ekonomi nasional.

Laporan mengenai Pedoman Lima Tahunan untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial tersebut diserahkan kepada KRN pada sidang atau sesi pertemuan tahunan KRN. Pada tiap sesi pertemuan tahunan KRN, para anggota KRN melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Negara dalam mengimplementasikan kebijakan, sekaligus memberikan persetujuan terhadap laporan pertanggung jawaban yang diberikan oleh perwakilan Dewan Negara. Adapun poin-poin dalam garis besar Pedoman Lima Tahun tersebut yang dirasa perlu untuk dilakukan perubahan demi melakukan adaptasi terhadap kondisi perekonomian dan lingkungan sosial, juga dilakukan dalam sesi pertemuan di tiap tahunnya. Bersama dengan perwakilan Dewan Negara serta Komisi Ekonomi dan Perdagangan Negara atau *State's Economic and Trade Commission*, para anggota KRN melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan jangka panjang ekonomi nasional tersebut.

3.1.2 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional

Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional atau *Standing Committee National People's Congress* merupakan suatu badan permanen yang melakukan tugas dan

fungsi KRN selama tidak diadakan sesi pertemuan KRN (gov.cn). Komite Tetap dalam menjalankan tugasnya juga diawasi oleh anggota-anggota KRN secara keseluruhan, memiliki kewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban kerja kepada KRN. Komite Tetap terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih pada sesi pertama pertemuan KRN, Sekjen dan para anggota yang merupakan utusan-utusan dari Partai Komunis; partai politik lainnya; tokoh-tokoh patriot yang tidak terikat dengan suatu partai; organisasi sosial pekerja atau yang terkait dengan permasalahan kepemudaan dan urusan perempuan; Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA); perwakilan dari tiap-tiap etnik minoritas di wilayah RRT.

Komite Tetap menjadi suatu badan perwakilan, dibentuk oleh KRN secara keseluruhan pada sesi pertama pertemuan KRN setiap lima tahun, melakukan beberapa dari tugas dan fungsi KRN yang diatur dalam konstitusi RRT. Terkait dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam bahasan mengenai kebijakan jangka panjang tentang ekonomi nasional dan pengembangan sosial di RRT, rincian mengenai hal tersebut dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut, yaitu pembuatan keputusan atas isu-isu penting, misalnya membuat keputusan untuk meratifikasi atau mencabut perjanjian atau persetujuan penting dengan negara asing; memberikan pangkat kepada personil militer dan diplomat serta pangkat khusus lainnya; menganugerahkan medali kenegaraan dan pangkat atau status kehormatan; keputusan untuk mengabdikan izin khusus, membuat keputusan ketika KRN tidak sedang dalam waktu sidang; mengenai pengumuman perang atau dalam pemenuhan kewajiban terhadap perjanjian internasional untuk melakukan pertahanan gabungan melawan tindakan agresi, pengambilan keputusan untuk melakukan mobilisasi masa secara umum atau parsial, pengambilan keputusan dalam penerapan Undang-undang darurat kepada seluruh negara atau provinsi tertentu; wilayah otonomi atau wilayah municipal secara langsung dibawah pemerintahan pusat; penyesuaian secara parsial

atas pedoman pembangunan ekonomi nasional dan sosial serta anggaran negara yang diperlukan selama masa implementasi.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas, Komite Tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan-perubahan secara parsial atau tidak menyeluruh terhadap pedoman ekonomi nasional dan pengembangan sosial, serta mengenai anggaran negara yang dirasa perlu untuk dilakukan perubahan selama masa implementasi kebijakan.

Tugas pokok, fungsi serta kewenangan dari Komite Tetap, kebijakan jangka panjang mengenai ekonomi nasional dan pengembangan sosial dapat dirubah guna melakukan penyesuaian-penyesuaian mengingat dinamika perekonomian nasional. Komite Tetap sebagai perwakilan dari KRN mampu menggunakan kewenangannya untuk memberikan suatu modifikasi khusus terhadap kebijakan jangka panjang tersebut, selama KRN tidak menyelenggarakan sesi pertemuan tahunannya. Komite Tetap memberikan pertanggung jawaban kepada seluruh anggota KRN pada sesi pertemuan KRN, mengenai kinerja, termasuk didalamnya jika Komite Tetap melakukan perubahan terhadap kebijakan jangka panjang yang sudah ditetapkan pada sesi pertama pertemuan KRN.

3.2 Dewan Negara

Dewan Negara atau *State Council* adalah badan eksekutif yang memiliki kekuasaan tertinggi yang memiliki kekuasaan dalam administrasi negara. Dalam struktur Dewan Negara terdapat Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Anggota-anggota Dewan Negara, Menteri yang bertugas dalam kementerian serta komisi-komisi tertentu, Auditor General dan Sekertaris Jenderal. Perdana Menteri merupakan suatu jabatan tertinggi dalam jajaran Dewan Negara, dibantu dengan Wakil Perdana Menteri, memiliki peran sebagai penanggung jawab atas kinerja Dewan Negara. Di dalam struktur Dewan Negara, terdapat beberapa jabatan kementerian yang mendapat pengawasan langsung dari Perdana Menteri untuk melakukan tugas-tugas eksekutif

berupa implementasi kebijakan serta mengusulkan kebijakan-kebijakan. Beberapa daftar kementerian yang terdapat dalam jajaran struktur Dewan Negara adalah sebagai berikut (gov.cn):

1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan Nasional
3. Kementerian Pendidikan
4. Kementerian IPTEK
5. Kementerian Industri dan IT
6. Kementerian Keamanan Publik
7. Kementerian Keamanan Negara
8. Kementerian Pengawasan
9. Kementerian Sipil
10. Kementerian Keadilan
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial
13. Kementerian Pertanahan dan Sumber Daya
14. Kementerian Perlindungan Lingkungan
15. Kementerian Perumahan dan Pengembangan Wilayah Urban-Rural
16. Kementerian Transportasi
17. Kementerian Transportasi Rel
18. Kementerian Sumber Air
19. Kementerian Agrikultur
20. Kementerian Perdagangan
21. Kementerian Budaya, dan
22. Kementerian Kesehatan

Selain terdapat jajaran kementerian, terdapat pula beberapa komisi khusus dan badan khusus yang menangani beberapa bidang tertentu, seperti:

1. Komisi Reformasi dan Pengembangan Nasional

2. Komisi Etnik Negara
3. Komisi Populasi Nasional dan Keluarga Berencana
4. Bank Rakyat Tiongkok atau *People's Bank of China*, dan
5. Kantor Audit Nasional

Setidaknya ada beberapa kementerian dan komisi yang menangani masalah ekonomi nasional dan terkait dengan implementasi kebijakan jangka panjang ekonomi nasional dan pengembangan sosial RRT. Kementerian Perdagangan atau *Ministry of Commerce* (MOFCOM) merupakan salah satu dari jajaran kementerian dalam Dewan Negara yang melaksanakan tugas yang terkait bidang perdagangan baik domestik maupun internasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan pembahasan kebijakan jangka panjang lima tahun ekonomi nasional dan pengembangan sosial, terdapat Komisi Reformasi dan Pengembangan Nasional atau *National Development and Reform Commission* (NDRC). Komisi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai suatu komisi khusus yang menangani permasalahan dan isu mengenai perkembangan nasional, khususnya dalam bidang perekonomian, dengan cara mengimplementasikan tugas dan kewenangannya untuk merancang suatu formulasi dan mengimplementasikan strategi pembangunan; melakukan pengamatan terhadap tren makro-ekonomi dan pengembangan sosial dan menyediakan prediksi tentang kondisi perekonomian di masa depan; melakukan analisa terhadap kondisi fiskal; mengarahkan, mempromosikan serta memberikan koordinasi terkait restrukturisasi sistim ekonomi, dan lain sebagainya (gov.cn, *National Development and Reform Commission, Main Functions of The NDRC*).

3.2 Kebijakan Ekonomi Nasional Jangka Panjang Republik Rakyat Tiongkok

Kemajuan ekonomi RRT merupakan suatu hasil dari implementasi kebijakan Pedoman Lima Tahun untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan tersebut merupakan suatu *master plan* kebijakan ekonomi RRT yang berlaku selama lima tahunan. Kebijakan lima tahunan dalam

perekonomian nasional menjadi suatu cetak biru perencanaan dan juga dasar bagi perancangan kebijakan ekonomi pemerintah, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pedoman Lima Tahun untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok di formulasikan pada momentum diselenggarakannya rapat tahunan Kongres Rakyat Nasional (KRN). Pada waktu yang sudah ditentukan, para anggota dari KRN merumuskan rancangan kebijakan lima tahunan, di setiap tahunnya selalu diadakan pertemuan KRN yang juga dalam agendanya membahas mengenai pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah di tiap tahunnya, berupa evaluasi dan juga pemantapan pedoman lima tahunan yang sudah dirancang sebelumnya. Perumusan kebijakan ekonomi nasional memiliki muatan politik bila disadari bahwa perumusan kebijakan tersebut merupakan suatu output dari sistim politik.

Pembahasan mengenai Pedoman Lima Tahun untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok hanya terbatas dalam analisa terhadap laporan implementasi pedoman tersebut. Laporan implementasi diberikan oleh pemerintah RRT kepada anggota kongres KRN pada setiap dilaksanakannya rapat tahunan KRN. Laporan implementasi pemerintah terhadap anggota KRN dilaksanakan untuk tujuan evaluasi serta perumusan rincian kebijakan berdasarkan rancangan awal pedoman jangka panjang ekonomi nasional dan pengembangan sosial untuk tahun berikutnya. Rincian kebijakan yang baru kemudian akan diimplementasikan kembali oleh pemerintah, dalam hal ini adalah struktur dewan negara sebagai badan eksekutif. Pimpinan dewan negara akan memberikan petunjuk dan perintah kepada jajaran kementerian yang terkait dengan bidang ekonomi, perdagangan, dan lainnya untuk melakukan implementasi terhadap kebijakan yang sudah dirancang dalam rapat tahunan KRN.

Merumuskan kebijakan pedoman pembangunan jangka panjang merupakan suatu kewajiban yang menjadi tugas pemerintah di RRT. Peraturan mengenai

kewajiban pemerintah untuk merancang suatu kebijakan jangka panjang tentang ekonomi nasional, diatur dalam konstitusi RRT. Bab pertama, pasal ke 15 dalam konstitusi RRT merupakan peraturan yang menjadi dasar kewajiban dan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembuatan suatu rancangan ekonomi (People's Daily). Pedoman yang dirancang oleh pemerintah merupakan suatu rancangan perekonomian yang berdasarkan pada prinsip sosialisme, penekanan terhadap pentingnya kepemilikan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang terkoordinasi dan terproporsikan dengan baik.

Kebijakan lima tahunan memiliki substansi yang terdiri dari beberapa bab, yang didalamnya terdapat target-target pencapaian ekonomi nasional hingga tata cara dan strategi untuk mencapai target-target tersebut. Perbaikan maupun perubahan terhadap Pedoman Lima Tahun untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok menghasilkan suatu draft rincian garis besar tugas, target perekonomian beserta rincian gambaran umum kebijakan ekonomi nasional untuk satu tahun dirumuskan pada sesi pertemuan KRN setiap tahunnya.

Laporan Implementasi Pedoman Lima Tahun untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok merupakan laporan pertanggung jawaban yang diajukan pemerintah kepada para anggota kongres pada sidang tahunan KRN. Setiap sidang tahunan KRN menjadi suatu momentum untuk melakukan evaluasi oleh kongres terhadap implementasi kebijakan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah, sekaligus menjadi suatu momentum untuk menetapkan adanya perubahan, melakukan improvisasi atau terus melanjutkan kebijakan yang sudah dibuat sebelumnya.

BAB 5. KESIMPULAN

Republik Rakyat Tiongkok menetapkan Pedoman Lima Tahun Ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok (*12th Five Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China*) tahun 2011 hingga 2015 dengan 1 bab yang secara keseluruhan bersubyek pada mempromosikan pembangunan ekonomi kelautan. Penetapan kebijakan maritim tersebut dikarenakan Republik Rakyat Tiongkok tahun 2011 lebih berfokus pada kekuatan laut dan menjadikan laut sebagai sektor negara yang mampu mengatasi permasalahan yang ada di RRT, dengan cara memasukkan kepentingan maritim kedalam Pedoman Lima Tahun Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok.

Keputusan pemerintah RRT menetapkan kebijakan maritim pada Pedoman Lima Tahun Ke-12 yang mana dalam karya tulis ilmiah ini dianalisis menggunakan teori Pengambilan Keputusan Richard C. Snyder. Teori tersebut menjelaskan bahwa negara merupakan aktor dari setiap situasi yang hadir dalam sebuah kebijakan negara yang mana pedekatan internal dan eksternal menjadi acuannya. Dalam hal ini, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai aktor pengambilan keputusan telah membuat keputusan menetapkan kebijakan maritimnya pada Pedoman Lima Tahun dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu: pertama adanya persoalan ketahanan pangan dan energi yang terjadi di RRT menjadikan pemerintah RRT mengalihkan fokus dari yang sebelumnya berfokus pada sektor pertanian menjadi sektor maritim. Kedua, pengembangan ekonomi kelautan dijadikan sebagai tujuan strategis pemerintah RRT untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerintah RRT mewujudkan Kekuatan maritim melalui kerjasama maritim antar negara dengan mengedepankan kepentingan nasional RRT. Keempat, persoalan sengketa Laut China Selatan yang berkaitan dengan sengketa gugusan kepulauan Spratly oleh negara-negara yang berbatasan langsung dan negara-negara yang

berkepentingan menjadikan konflik Laut China Selatan semakin berkepanjangan. Kelima, upaya pemerintah RRT dalam mewujudkan transparansi dalam setiap kebijakan RRT yang berkaitan dengan pemerintah yang terbuka dan pemerintah yang baik.

Berdasarkan pada temuan yang telah dianalisa, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah RRT dalam menetapkan kebijakan maritimnya pada Pedoman Lima Tahun Ke-12 untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional tahun 2011 hingga 2015 dengan pertimbangan beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi alasan. Pada faktor internal yaitu upaya dari pemerintah RRT dalam menjaga ketahanan pangan dan energi, nilai ekonomi dan politik. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu adanya sengketa Laut China Selatan yang berkepanjangan dan upaya mewujudkan transparansi dalam pemerintahan RRT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bowett, D. W. 1979. *The Legal Regime of Island in the South China Sea*. New York: Ocean Publication.
- China Institute for Marine Affairs. 2012. *China's Ocean Development Report*. China Ocean Press.
- Florini, Ann., Hairong Lai dan Yeling Tan. 2012. *China Experiments-From Local Innovations to National Reform*. Brookings Institution Press
- Huang J K, Bouis H. 1996. *Structural Changes in the Demand for Food in Asia. Agriculture and the Environmental Discussion Paper No.11*. International Food Policy Research Institute, Washington, D. C.
- Djalal, H. 1990. *Potential Conflict in the South China Sea: In Search of Cooperation* Vol. 18. Indonesia Quarterly.
- Djalal, H. 1996. Posisi Negara-Negara Besar Menghadapi Potensi Konflik di Laut China Selatan. *Forum Dialog II Politik dan Keamanan Regional dalam Era Pasca Perang Dingin*.
- Heinzig, Dieter. 1976. *Disputed Islands in the South China Sea: Pracels, Spratlys, Pratas, Macclesfield Bank*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Jiang, Jin. 2012. *The Law Enforcement Vessels of the Fisheries Law Enforcement Command*. Naval and Merchant Ships.
- Jun'ichi, Takeda. 2014. *China's Rise as a Maritime Power: Ocean Policy from Mao Zedong to Xi Jinping*. Review of Island Studies.
- Junting, Li and Yang Jinhe, eds. 1990. *An Examination of China's Armed Forces 1949-1989*. People's Publishing House.
- Lim, J. J. 1979. *Geostrategy and the South China Sea Basin*. Singapore University Press.

- Lidong, Wang. 2007. *Theory of the State's Maritime Interests*. National Defense University Press.
- Oceanic Activity in Contemporary China. 1985. China Social Sciences Press.
- NBSC (National Bureau of Statistics of China). 2016. *China Statistical Yearbook*. China Statistics Press, Beijing.
- Mas'oeed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Masuda, Masayuki. 2012. *China's Maritime Strategy and Maritime Law Enforcement Agencies: Quest for a Maritime Power*. Chapter 4. NIDS Joint Research Series No.10.
- Perwita, A. A. B. & Yanyan M. Y. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Snyder, R. C., Bruck H. W. dan Sapin B. (eds). 1962. *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics*. New York: The Free Press.
- Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China on the Diaoyu Islands Sovereignty Issue. 1997. China Social Sciences Press.
- To, Lee Lai. 1977. *The PRC and the South China Sea*. Chopmen Enterprises.
- Valencia, M. J. 1995. *China and the South China sea Dispute*. Oxford: Oxford University Press for the International Institute for Strategic Studies
- Wardhono, Adhitya, dkk. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University press.
- Wenhe, Yang & Chen Boyong & Wang Hui, eds. 2003. *Oceanic Events of Twentieth-Century China*. China Ocean Press.
- Xinhua. 2011. *Outlines of Twelfth Five-year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China*.
- Zhiming, Zhang. 2012. *The CMS Corps Protecting Diaoyu Island*.

Zhongmin, Liu. 2009. *Global Ocean Politics and China's Ocean Development Strategy*. Current Affairs Press.

Dokumen:

Hukum Energi Terbarukan Republik Rakyat Tiongkok. Diumumkan secara resmi 28 Februari 2005, berlaku 1 Januari 2006.

Pedoman ke-11 Lima Tahun Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Berlaku 2006-2010.

Pedoman ke-12 Lima Tahun Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Republik Rakyat Tiongkok. Berlaku 2011-2015.

Full text of Hu Jintao's report at 18th Party Congress. 2012. Embassy of the People's Republic of China in the United States of America.

Dokumen Fagaijiage. 2008. *Notice of the National Development and Reform Commission and the Ministry of Finance on the Standards for Fees Collected*. Administrative Organs for Providing Open Government Information upon Request and Other Relevant Issues.

Xinhua. 2010. *Full text: China's Efforts to Combat Corruption and Build a Clean Government*

Xinhua. 2011. *Outlines of Twelfth Five-year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China*.

Jurnal:

American Journal of Agricultural Economics. 2017. *Food and Agricultural Organization, the United Nations*. FAOSTAT.

Burns, John P. 2007. *Civil Service Reform in China*. OECD Journal on Budgeting. Volume 7.

- Cigui, Liu. 2012. The First-Ever Reference to 'Maritime Power' in the Political Report to the 18th Party Congress Has Important Practical and Strategic significance. *China Oceanology Review*.
- Fan S G, Wailes E J, Cramer G L. 1995. *Household demand in rural China: A two-stage LES-AIDS model*.
- Horsley, Jamie P. 2016. China Promotes Open Government as it Seeks to Reinvent Its Governance Model. Yale Law School China Center.
- Horsley, Jamie P. *Measures on Open Environmental Information (for Trial Implementation)*. Terjemahan dari State Environmental Protection Administration of China pada 8 Februari 2007; berlaku pada tanggal 1 Mei 2008.
- Kelly, david. 2013. *Approaching Chinese Freedom: A Study in Absolute and Relative Values*, in: *Journal of Current Chinese affairs*. Current Chinese Affairs: China Aktuell.
- Khairul, Isson. 2015. *Strategi China Sejahterakan Petani dan Kembangkan Industri*.
- Ma H Y, Huang J K, Fuller F, Rozelle S. 2006. *Getting rich and eating out: Consumption of food away from home in urban China*. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue canadienne d'agroeconomie. Volume 54
- McMichael P. 2000. A global interpretation of the rise of the East Asian food import complex. *World Development*.
- Singh, Swaran. 1999. Strategic Analysis: *Continuity and change in China's maritime strategy*. IDSA: Research Fellow. Volume 23
- Sumakul, W. F. 2009. *China Fleet Review: Sebagai Bukti Kekuatan Maritim Baru di Kawasan Asia Pasifik*. Forum Kajian Pertahanan Maritim.

Internet:

- China Radio Internasional (CRI) Bahasa Indonesia *online*. *Laut Teritorial dan Kepulauan*. China ABC Chapter 1. Dikutip dari

<http://indonesian.cri.cn/chinaabc/chapter1/chapter10103.htm> (diakses pada tanggal 27 Mei 2018)

FAO (*Food and Agricultural Organization, the United Nations*). 2007. *FAOSTAT*.

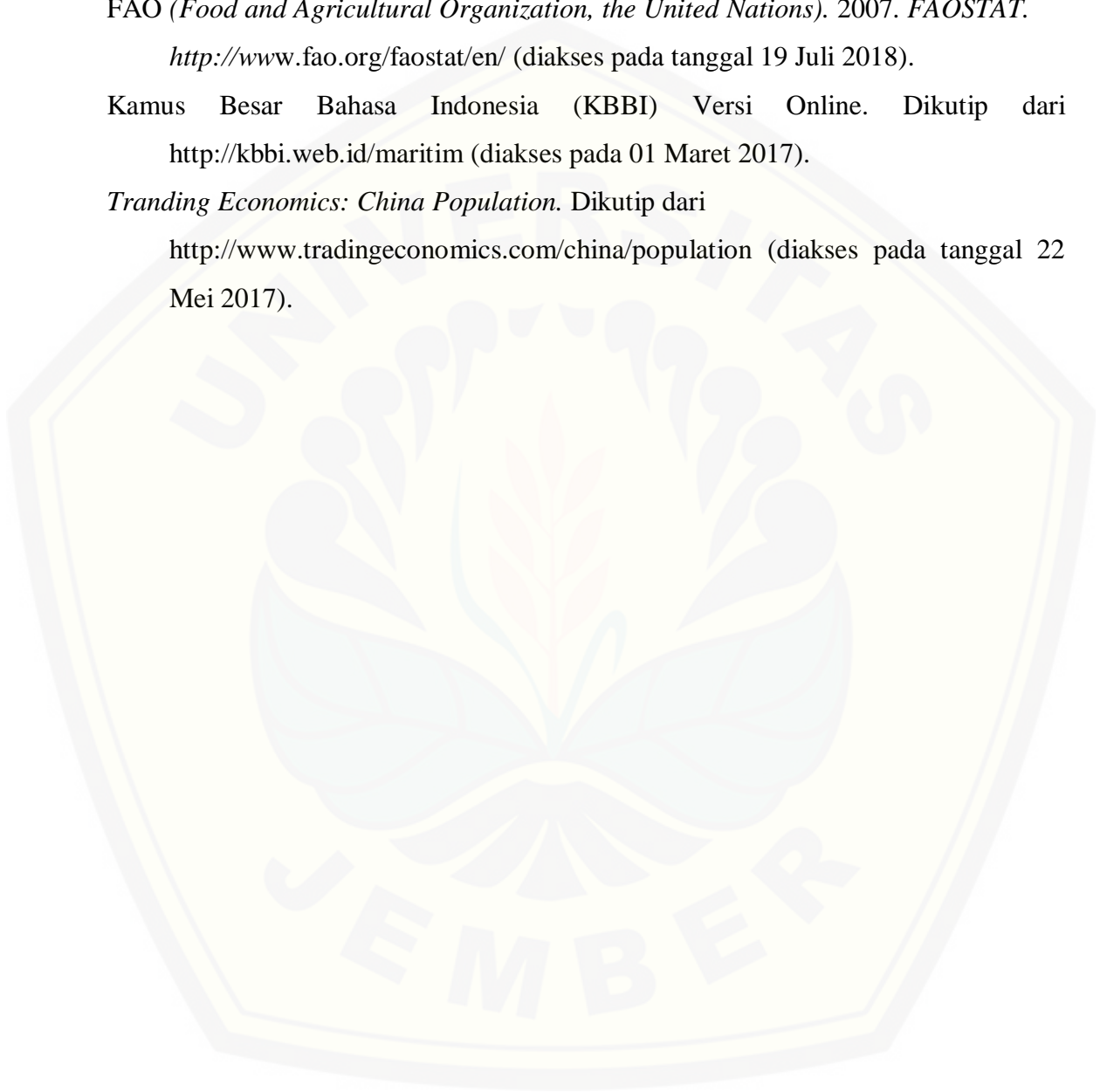
<http://www.fao.org/faostat/en/> (diakses pada tanggal 19 Juli 2018).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. Dikutip dari

<http://kbbi.web.id/maritim> (diakses pada 01 Maret 2017).

Tranding Economics: China Population. Dikutip dari

<http://www.tradingeconomics.com/china/population> (diakses pada tanggal 22 Mei 2017).



Lampiran I

China's 12th Five-Year Plan (2011-2015)

CHINA'S 12TH FIVE-YEAR PLAN (2011-2015)

Chapter 14: Promote the development of marine economy

Develop and implement a marine development strategy based on unified sea and land planning, and improve marine development and control capabilities.

Section 1 Optimizing the marine industry structure

Plan the development of the marine economy scientifically, exploit and utilize marine resources rationally, develop marine oil and gas, marine transport, marine fishing and coastal travel industries greatly, and expand marine biopharmaceutical, integrated seawater utilization, marine engineering equipment manufacturing and other rising industries. Strengthen the R&D of basic, proactive and critical marine technologies, improve marine technology level, and improve marine development and utilization capabilities. Deepen the integration of port and coast resources, and optimize port layout. Develop and implement marine master plans, optimize the spatial layout of the marine economy. Carry out trials of marine economy development in Shandong, Zhejiang and Guangdong Provinces.

Section 2 Strengthening integrated marine management

Improve the marine management mechanism through enhanced coordination. Strengthen sea area and island management, improve the market mechanism for sea area use rights, promote the protection and utilization of sea islands, and support the development of remote seas islands. Make unified planning of marine environmental protection and land-based pollution, and strengthen the protection and recovery of the marine ecosystem. Prevent the overexploitation of offshore resources, strengthen

reclamation management, and regulate the utilization of unoccupied sea islands strictly. Improve the marine disaster relief system, and strengthen the handling capability of marine emergencies. Strengthen integrated marine surveying and mapping, and carry out polar and oceanic scientific investigation actively. Improve maritime laws, regulations and policies, and enhance marine law-enforcement to maintain the order of exploitation of marine resources. Strengthen bilateral and multilateral marine affairs negotiation, participate in international marine affairs actively, ensure the safety of marine transport channels, and maintain our country's marine rights and interests.

